

**EVALUASI PROGRAM PELATIHAN VOKASI DALAM
MENGATASI *SKILL MISMATCH* DI BALAI
LATIHAN KERJA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NUR'AINI WANDIRA

NIM. 220802068

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR'AINI WANDIRA
NIM : 220802068
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan ilmu
Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 18 Oktober 2004
Alamat : Ling Trandam Kute Kutacane, Kecamatan
Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2026
Yang menyatakan



10000
METERAI
TEMPEL
377A0X114728101

NUR'AINI WANDIRA
NIM. 220802068

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
EVALUASI PROGRAM PELATIHAN VOKASI
DALAM MENGATASI *SKILL MISMATCH*
DI BALAI LATIHAN KERJA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi

Oleh:

NUR'AINI WANDIRA

NIM. 220802068

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.

NIP. 196110051982031007

Pembimbing II,


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si

NIP. 198905182023211032

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

EVALUASI PROGRAM PELATIHAN VOKASI DALAM MENGATASI *SKILL MISMATCH* DI BALAI LATIHAN KERJA ACEH

NUR'AINI WANDIRA

NIM. 220802068

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: 20 Agustus 2026

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

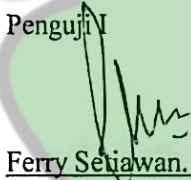
Ketua


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M., Si.
NIP. 197810162008011011

Sekretaris


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si
NIP. 198905182023211032

Penguji I


Ferry Setiawan, S.E., AK., M.Si.
NIP. 1978020032005041001

Penguji II


Mardani Malemi, S.Fil., M.A.P.
NIP. 198105052011011004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Muri-Mulia, M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh dalam mengatasi *skill mismatch* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelatihan belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Evaluasi program menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan vokasi di BPVP Aceh secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi dalam mengatasi *skill mismatch*. Pada aspek *context*, program telah disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi dan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Pada aspek *input*, pelatihan didukung oleh instruktur, materi berbasis kompetensi, serta sarana dan prasarana yang secara umum memadai. Pada aspek *process*, pelatihan dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis praktik dan dilanjutkan dengan magang. Pada aspek *product*, peserta memperoleh keterampilan yang sesuai dengan bidang pelatihan dan dapat diterapkan dalam pekerjaan. Namun, program belum optimal karena dipengaruhi oleh sikap kerja dan kesiapan bekerja peserta, kurangnya komitmen sebagian peserta, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya minat berwirausaha, serta perlunya pembaruan sarana pada beberapa kejuruan.

Kata kunci: Evaluasi Pelatihan Vokasi, *Skill Mismatch*, BPVP Aceh, CIPP.

KATA PENGANTAR

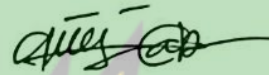
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Evaluasi Program Pelatihan Vokasi Dalam Mengatasi Skill Mismatch Di Balai Latihan Kerja Aceh"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan analisis. Namun, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., M.PA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Taufik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

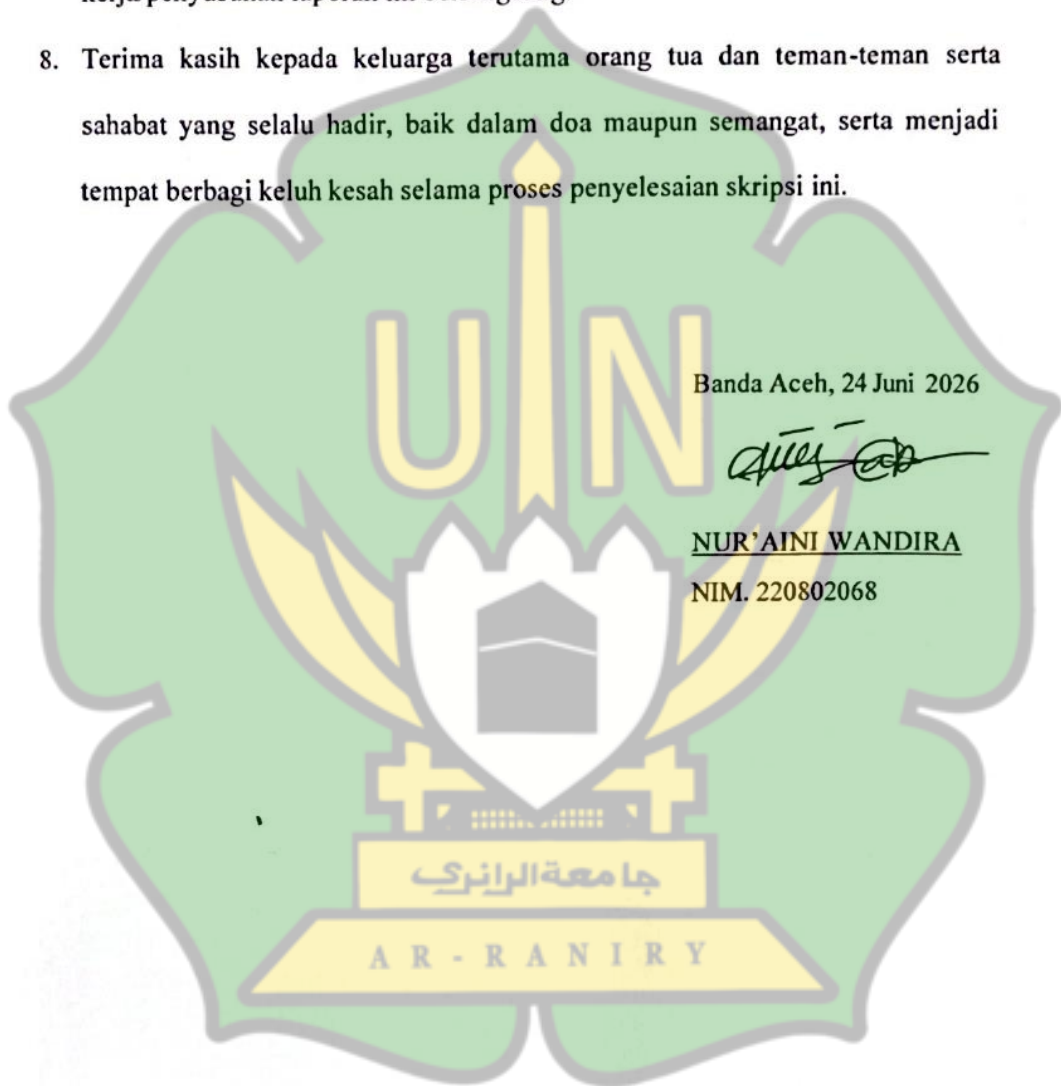
7. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) atas bantuan, keterbukaan informasi, dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian/praktik kerja/penyusunan laporan ini berlangsung.
8. Terima kasih kepada keluarga terutama orang tua dan teman-teman serta sahabat yang selalu hadir, baik dalam doa maupun semangat, serta menjadi tempat berbagi keluh kesah selama proses penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 24 Juni 2026



NUR'AINI WANDIRA

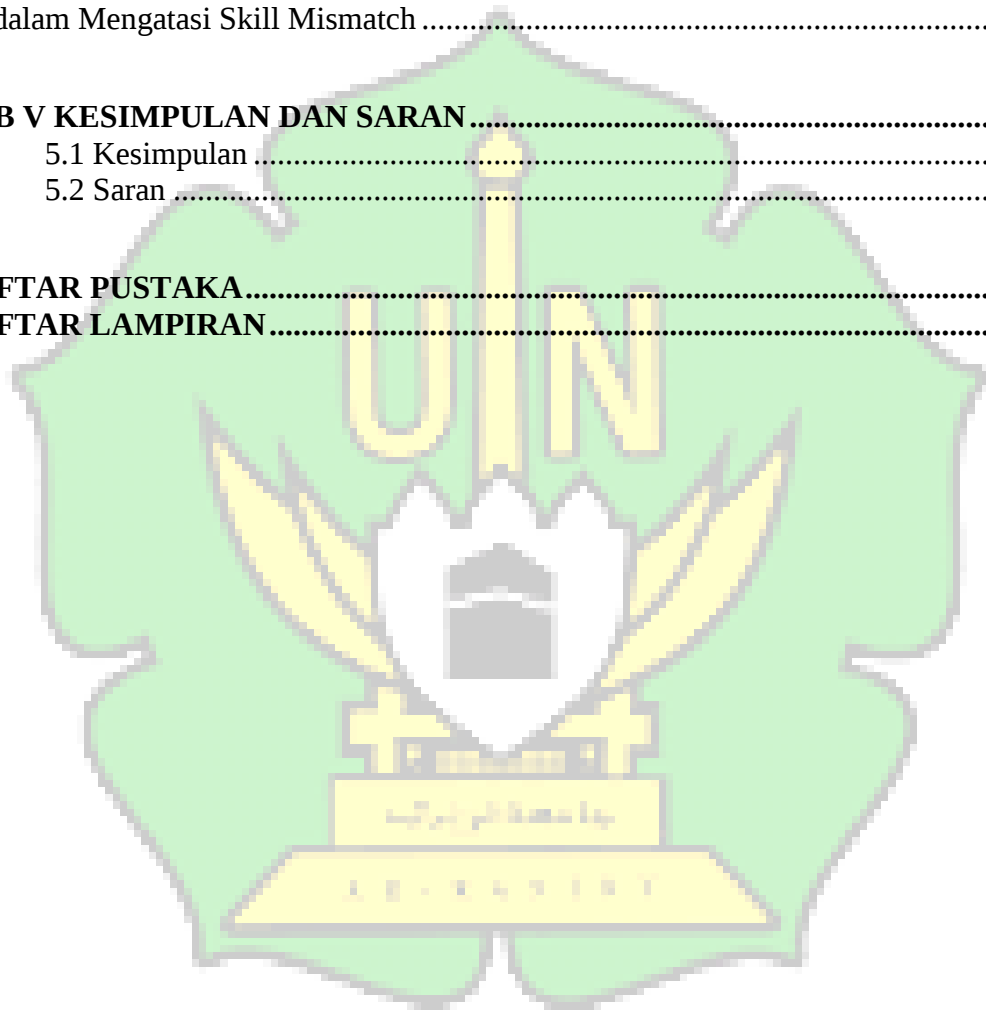
NIM. 220802068



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori.....	17
2.2.1 Teori Evaluasi	17
2.2.2 Konsep Pelatihan Vokasi	18
2.2.3 Konsep Skill Mismatch.....	20
2.3 Kerangka Berpikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Lokasi Penelitian.....	22
3.2 Jenis Penelitian.....	22
3.3 Metode Pengumpulan Data	22
3.4 Informan Penelitian.....	24
3.5 Sumber Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	25
3.7 Teknik Keabsahan Data	26
3.8 Fokus Penelitian.....	26
3.9 Jadwal Penelitian	27
3.10 Sistematika Penulisan	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1. Gambaran Umum.....	28
4.1.1. Sejarah Singkat Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh	28
4.1.2. Visi dan Misi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh..	29
4.1.3. Struktur Organisasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh.....	30

4.1.4. Program Pelatihan Vokasi BPVP Aceh	32
4.1.5. Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh.....	35
4.2 Peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dalam Mengatasi <i>Skill Mismatch</i>	38
4.3 Evaluasi <i>Context</i> (Konteks)	40
4.4 Evaluasi <i>Input</i> (Masukan)	45
4.5 Evaluasi <i>Process</i> (Proses)	56
4.6 Evaluasi <i>Product</i> (Hasil).....	66
4.7 Kontribusi pelatihan dalam mengatasi <i>Skill Mismatch</i>	75
4.8 Faktor-faktor yang Menyebabkan Program Pelatihan Vokasi Belum Optimal dalam Mengatasi Skill Mismatch	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DAFTAR LAMPIRAN.....	92



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	24
Tabel 3.2 Fokus Penelitian	26
Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana BPVP Aceh	37
Tabel 4.2 Ringkasan Materi Pelatihan pada Setiap Program Pelatihan di BPVP Aceh	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh	29
Gambar 4.2 Struktur Organisasi (BPVP)	32
Gambar 4.3 Sarana dan Prasarana	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*) menjadi tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja di Indonesia. International Labour Organization (ILO) mendefinisikan *skill mismatch* sebagai ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kualifikasi maupun keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Laporan *World Bank* dan Kementerian Ketenagakerjaan RI (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 60% tenaga kerja di Indonesia berada pada posisi ketidaksesuaian keterampilan, baik secara vertikal (*overeducated/undereducated*) maupun horizontal (bidang keahlian tidak relevan dengan jenis pekerjaan). Dampak utama dari fenomena ini adalah rendahnya produktivitas, stagnasi upah (*wage penalty*), dan tingginya angka pengangguran terdidik.

Menurut International Labour Organization (ILO), *skill mismatch* adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki individu dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan atau oleh pasar kerja. Kondisi ini dapat terjadi karena perubahan teknologi, perkembangan kebutuhan industri yang berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan sistem pendidikan dan pelatihan dalam menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.¹

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) membedakan *skill mismatch* dalam beberapa bentuk, yaitu: (1) *skills shortage*, yaitu kondisi ketika keterampilan yang dibutuhkan perusahaan tidak tersedia dalam jumlah yang memadai di pasar kerja; (2) *overskilling*, yaitu pekerja memiliki keterampilan yang

¹ Organización Internacional del Trabajo (OIT), *Skills Mismatch in Europe*, Departamento de Estadísticas, OIT, 2014.

lebih tinggi daripada yang dibutuhkan pekerjaannya; (3) *underskilling*, yaitu pekerja memiliki keterampilan yang lebih rendah daripada tuntutan pekerjaannya; (4) *overqualification*, yaitu tingkat pendidikan atau kualifikasi pekerja lebih tinggi daripada persyaratan pekerjaan; dan (5) *underqualification*, yaitu tingkat pendidikan atau kualifikasi pekerja lebih rendah daripada yang dipersyaratkan.²

Berbagai negara mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Vokasi adalah bentuk pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada penguasaan keterampilan praktis sesuai dengan bidang pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya ialah menyiapkan peserta agar memiliki kemampuan yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Sistem vokasi mengedepankan praktik, pengalaman langsung, serta pembelajaran berbasis kompetensi agar lulusan siap bekerja dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan industri.³

Di Indonesia, konsep vokasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi. Aturan ini menegaskan bahwa pelatihan vokasi harus berbasis kompetensi dan berorientasi pada kebutuhan industri (*link and match*). Program pelatihan juga harus dilengkapi dengan sertifikasi keahlian dan dilaksanakan bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, lulusan pelatihan diharapkan mampu memiliki keterampilan yang relevan, terukur, dan diakui oleh pasar kerja.⁴ Pelaksanaan pelatihan vokasi di

² World Bank Group, "Indonesia's Critical Occupations List 2018," 2020, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/519581585858136687/pdf/Indonesias-Critical-Occupations-List-2018-Occupation-Profiles.pdf>.

³ Wikan Sakarinto, "Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Provesi," no. May (2020).

⁴ Yassierli, "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi" 11, no. 1 (2025): 1–44, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://>

Indonesia dijalankan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja daerah. BLK memiliki fungsi strategis sebagai wadah peningkatan kompetensi tenaga kerja di berbagai bidang seperti otomotif, kelistrikan, tata boga, desain grafis, dan teknologi informasi. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, BLK diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang terampil, produktif, dan siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global.⁵

Di pasar tenaga kerja Indonesia, penyebab ketidaksesuaian keterampilan, dapat ditelusuri dari beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, horizontal mismatch adalah ketidaksesuaian antara bidang pendidikan yang ditempuh tenaga kerja dan jenis pekerjaan yang tersedia di pasar kerja. Ini terjadi ketika lulusan memiliki keterampilan yang berbeda dari yang dibutuhkan pekerjaannya, sehingga kemampuan mereka tidak dioptimalkan. Selain itu, ketidaksesuaian vertikal juga merupakan faktor penting yang menyebabkan tingkat pendidikan tenaga kerja lebih tinggi (*overeducation*) atau lebih rendah (*undereducation*) dibandingkan dengan kebutuhan pekerjaan.

Fenomena *skill mismatch* tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pasar kerja karena dapat menghambat penyerapan tenaga kerja dan mengurangi produktivitas. Oleh karena itu, kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah, termasuk Provinsi Aceh, perlu mendapat perhatian sebagai upaya untuk mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Aceh masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Aceh mencapai sekitar 2,60 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar

⁵ “Vokasi Kini Lebih Modern: Mengupas Permenaker No.6 Tahun 2025,” *Kita Kompeten Muda-Kreatif-Inovatif*, 2025, https://kitakompeten.id/vokasi-kini-lebih-modern-mengupas-permenaker-no-6-tahun-2025/?utm_source=.

2,46 juta orang telah bekerja, sedangkan sekitar 145 ribu orang masih menganggur. Kondisi tersebut tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh yang mencapai 5,56 persen. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan Februari 2023, tingkat pengangguran di Aceh masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian karena menunjukkan masih adanya tenaga kerja yang belum terserap oleh pasar kerja.

Balai Latihan Kerja (BLK) Aceh, khususnya BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Banda Aceh, menjadi salah satu lembaga utama yang berperan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah. Lembaga ini telah mengadakan berbagai pelatihan berbasis kompetensi, seperti pelatihan barista, desain grafis, otomotif, dan teknologi informasi. Program tersebut dirancang untuk memberikan keterampilan praktis bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif.⁶

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh, secara aktif menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang berorientasi pada keterampilan praktis guna menekan tingkat *skill mismatch* antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Antara News (2024), BPVP Banda Aceh telah melatih sekitar 3.800 peserta selama tahun 2024 melalui 12 program kejuruan, di antaranya teknik otomotif, teknik listrik, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), garmen apparel, teknik las, teknik konstruksi, manufaktur, bisnis dan manajemen, teknik refrigerasi, serta industri kreatif.⁷

⁶ Antara Aceh, "Disnakermobduk: BLK Bisa Ciptakan Generasi Yang Lebih Mandiri," *Aceh.Antaranews*, 2023, https://aceh.antaranews.com/berita/324789/disnakermobduk-blk-bisa-ciapkan-generasi-yang-lebih-mandiri?utm_source=.

⁷ Antara aceh, "BPVP Banda Aceh Latih 3.800 Orang Dengan Berbagai Keahlian Selama 2024," *Aceh.Antaranews*, 2025, https://aceh.antaranews.com/berita/375163/bpvp-banda-aceh-latih-3800-orang-dengan-berbagai-keahlian-selama-2024?utm_source=.

Program pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Pelaksanaan pelatihan vokasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memastikan bahwa kompetensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan vokasi diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelatihan vokasi dalam mendukung kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja.

Sebelumnya, pada tahun 2023, BPVP Banda Aceh juga melaksanakan program pelatihan kewirausahaan muda tahap III yang melibatkan 352 peserta dari 22 paket kejuruan, seperti otomotif, fashion, bisnis manajemen, bangunan, bakery, desain grafis, dan konten kreatif.⁸ Selain itu, pada tahun 2025 lembaga ini kembali membuka program pelatihan kewirausahaan Batch 1 yang diikuti oleh 43 peserta, yang bertujuan untuk membentuk wirausahawan muda dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal.⁹

Program pelatihan tersebut menunjukkan komitmen BPVP Aceh dalam memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Berdasarkan data dari laman resmi *Skillhub Kementerian Ketenagakerjaan*, BPVP Aceh menyelenggarakan sedikitnya 12 bidang kejuruan aktif, meliputi sektor teknik, pariwisata, bisnis dan manajemen, garmen, TIK, dan teknik manufaktur, yang seluruhnya diarahkan untuk mendukung kesiapan tenaga kerja menghadapi transformasi

⁸ Antara Aceh, “BPVP Banda Aceh Latih 352 Peserta Jadi Wirausaha Muda,” *Aceh Antaranews*, 2025, https://aceh.antaranews.com/berita/335733/bpvp-banda-aceh-latih-352-peserta-jadi-wirausaha-muda?utm_source=.

⁹ Kemenaker, “Wujudkan Kemandirian Ekonomi, BPVP Banda Aceh Resmi Buka Pelatihan Kewirausahaan Batch 1,” *Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Banda Aceh*, 2025, https://blkaceh.kemnaker.go.id/wujudkan-kemandirian-ekonomi-bpvp-banda-aceh-resmi-buka-pelatihan-kewirausahaan-batch-1/?utm_source=.

digital dan industri modern. Meskipun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa tingkat penyerapan kerja lulusan pelatihan masih belum optimal.

Berdasarkan *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023*, tercatat bahwa 98,16% peserta pelatihan BPVP Aceh telah memperoleh sertifikasi, namun hanya sekitar 45,96% yang berhasil terserap ke dunia kerja menunjukkan masih adanya ketimpangan antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan industri lokal.¹⁰ Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya persentase peserta yang memperoleh sertifikasi belum sepenuhnya diikuti dengan tingginya tingkat penyerapan lulusan ke dunia kerja. Sertifikasi kompetensi pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi tertentu.

Namun, berdasarkan data tersebut masih terdapat perbedaan antara jumlah peserta yang telah memperoleh sertifikasi dengan jumlah peserta yang berhasil terserap ke dunia kerja. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kesesuaian kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan vokasi tidak hanya perlu berorientasi pada pencapaian sertifikasi kompetensi, tetapi juga pada relevansi materi pelatihan, proses pembelajaran, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan pasar kerja sehingga tujuan pelatihan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dapat tercapai.

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan vokasi di BPVP Aceh guna menilai sejauh mana program pelatihan mampu mengurangi *skill mismatch* di wilayah ini. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada

¹⁰ M.Si Amiruddin, SE., “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Tahun 2023,” *Pemko Banda Aceh*, 2024, 1–252.

kuantitas peserta pelatihan atau jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga pada kualitas dan relevansi keterampilan yang dihasilkan terhadap kebutuhan industri lokal. Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pelatihan kerja yang lebih efektif dan berkelanjutan di Aceh.

Pelatihan vokasi diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kompetensi yang diperoleh peserta tidak hanya mencakup penguasaan keterampilan teknis (*hard skills*), tetapi juga keterampilan nonteknis (*soft skills*) yang dibutuhkan di lingkungan kerja. Kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki peserta dengan kebutuhan pasar kerja menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, sehingga lulusan memiliki daya saing yang lebih baik dalam memasuki dunia kerja.

Selain meningkatkan kompetensi, pelatihan vokasi juga diharapkan dapat meningkatkan peluang peserta untuk memperoleh pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan melalui kegiatan berwirausaha. Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja akan meningkatkan kemampuan peserta dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di sisi lain, keterampilan yang diperoleh selama pelatihan juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mandiri sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi peserta setelah menyelesaikan pelatihan. Meningkatnya kesempatan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini dengan mengambil judul “Evaluasi Pelatihan Vokasi dalam Mengatasi *Skill Mismatch* di Balai Latihan Kerja Aceh”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang diperoleh peserta pelatihan dengan kebutuhan industri (*skill mismatch*), sehingga efektivitas pelatihan vokasi di BPVP Aceh dalam mengatasi ketidaksesuaian tersebut perlu dievaluasi.
2. Belum optimalnya penyerapan lulusan pelatihan vokasi ke dalam dunia kerja atau usaha, sehingga perlu diketahui sejauh mana hasil pelatihan mampu meningkatkan peluang kerja dan kemandirian peserta setelah menyelesaikan pelatihan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi program pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh berdasarkan aspek context, input, process, dan product dalam upaya mengurangi skill mismatch?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan program pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh belum optimal dalam mengurangi skill mismatch?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis evaluasi pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh BPVP Aceh dalam mengatasi *skill mismatch* antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja di Aceh.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan program pelatihan vokasi belum optimal dalam mengatasi *skill mismatch* di BPVP Aceh.

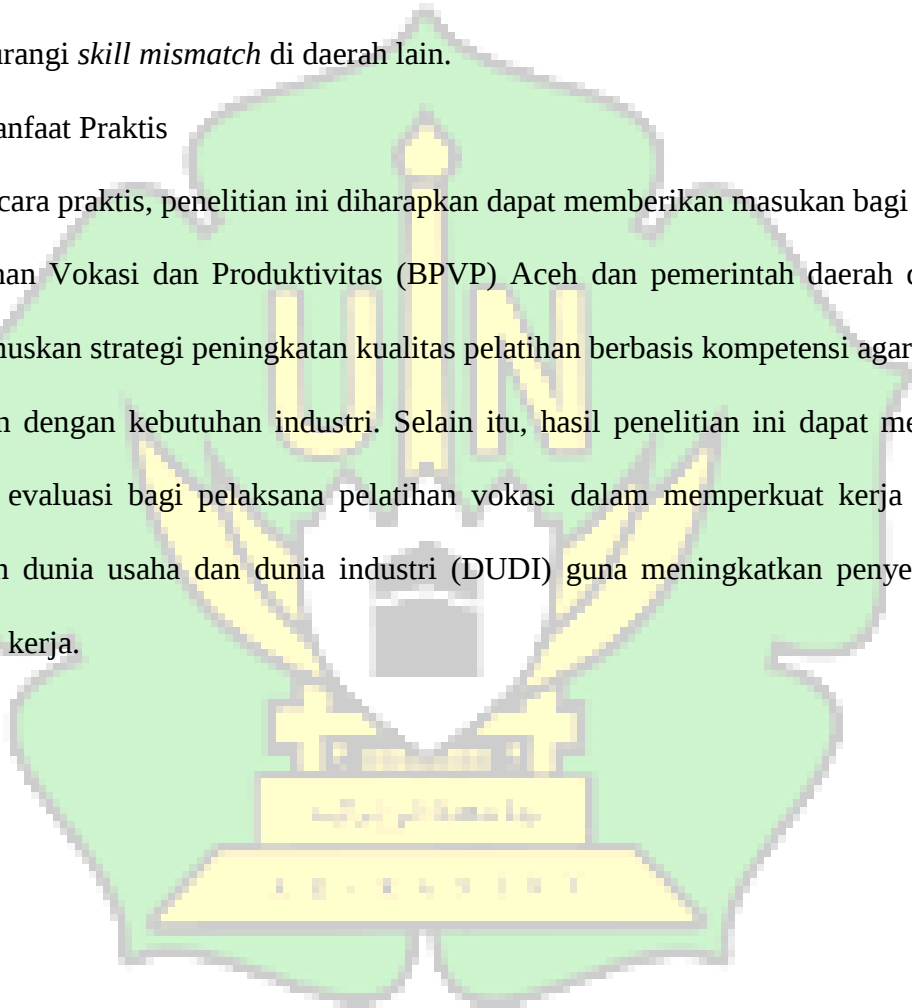
1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan vokasi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji efektivitas program pelatihan vokasi dalam mengurangi *skill mismatch* di daerah lain.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi agar lebih relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana pelatihan vokasi dalam memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Stevanus Agung Wibowo (2022) berjudul *“Evaluasi Program Pelatihan Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan Selama Periode Pandemi COVID-19 Tahun 2021”* menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai efektivitas pelatihan vokasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan vokasi di masa pandemi belum optimal, karena keterbatasan fasilitas, kesiapan instruktur, serta lemahnya sistem pemantauan pasca pelatihan. Pada aspek hasil (*product*), pelatihan belum mampu meningkatkan penyerapan kerja secara signifikan. *Gap* dari penelitian ini adalah belum adanya analisis terhadap dampak pelatihan dalam mengurangi *skill mismatch* secara regional, termasuk di wilayah Aceh.¹¹

Persamaan antara penelitian Stevanus Agung Wibowo (2022) dengan penelitian saya terletak pada fokus kajiannya yang sama-sama meneliti program pelatihan vokasi serta menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai efektivitas program tersebut. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta menganalisis data melalui tahap kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Adapun perbedaannya, penelitian Stevanus berfokus pada

¹¹ Stevanus Agung Wibowo, “Evaluasi Program Pelatihan Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan Selama Periode Pandemi Covid-19 Tahun 2021,” *Universitas Pandjadjaran*, 2022, 1–16.

evaluasi pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan selama masa pandemi COVID-19 secara nasional, sedangkan penelitian saya berfokus pada evaluasi pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pelatihan tersebut berperan dalam mengurangi terjadinya skill mismatch secara regional. Dengan demikian, penelitian saya memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik secara geografis serta menambahkan analisis terhadap relevansi antara hasil pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, yang belum dibahas dalam penelitian Stevanus.

2. Arif Maulana dan Nugrahayu Suryaningrum (2023) dalam penelitian berjudul *“Pendidikan Vokasi, Pelatihan dan Pengangguran Usia Muda di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19”* menggunakan teori modal manusia (human capital theory) untuk menjelaskan hubungan antara pendidikan vokasi, pelatihan, dan pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data sekunder dari *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)* serta menerapkan regresi logistik biner untuk mengukur probabilitas pengangguran pada lulusan vokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi dapat menurunkan tingkat pengangguran formal, namun belum efektif menekan pengangguran di sektor informal, khususnya pada usia muda. *Gap* penelitian ini adalah tidak menyoroti pelatihan vokasi berbasis lembaga seperti BLK dan tidak membahas implementasi pelatihan di tingkat daerah.¹²

Persamaan antara penelitian Arif Maulana dan Nugrahayu Suryaningrum (2023) dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pendidikan dan pelatihan vokasi serta kaitannya dengan pengangguran atau

¹² Arif Maulana and Nugrahayu Suryaningrum, “Pendidikan Vokasi, Pelatihan Dan Pengangguran Usia Muda Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Vocational Education, Training, and Youth Unemployment in Indonesia during the Covid-19 Pandemic,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 18, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.55981/jki.2023.1697>.

ketenagakerjaan. Keduanya juga memiliki tujuan yang sejalan, yaitu untuk menilai efektivitas pelatihan vokasi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada pendekatan dan lingkup penelitian. Penelitian Arif dan Nugrahayu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder Sakernas dan regresi logistik biner untuk melihat hubungan statistik antara pendidikan vokasi dan tingkat pengangguran secara nasional. Sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP untuk menilai implementasi pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh. Selain itu, penelitian saya berfokus pada analisis peran pelatihan vokasi dalam mengurangi skill mismatch secara regional, sedangkan penelitian Arif dan Nugrahayu belum membahas aspek tersebut serta belum menyoroti peran lembaga pelatihan daerah seperti BLK dalam konteks peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

3. A.N. Hidayat (2022) berjudul *“Peran Balai Latihan Kerja dalam Meningkatkan Keterampilan Masyarakat”* menjelaskan bagaimana lembaga pelatihan pemerintah berperan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi kerja masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap peserta pelatihan, instruktur, serta pengelola BLK. Analisis data dilakukan menggunakan metode Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan di BLK memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan masyarakat, terutama dalam bidang otomotif, menjahit, dan teknologi informasi. Pelatihan juga membantu peserta memperoleh kepercayaan diri dan kemampuan untuk memulai usaha mandiri.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar peserta belum terserap secara optimal di dunia kerja karena masih lemahnya hubungan antara BLK dan pihak industri (*link and match*). *Gap* penelitian ini terletak pada belum adanya analisis kuantitatif mengenai kontribusi pelatihan terhadap pengurangan *skill mismatch* serta belum adanya evaluasi spesifik pada konteks wilayah tertentu seperti Aceh.¹³

Persamaan antara penelitian A.N. Hidayat (2022) dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian yang sama-sama meneliti peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja masyarakat. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Tujuan kedua penelitian ini pun serupa, yaitu untuk menilai kontribusi pelatihan vokasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perbedaannya terletak pada cakupan dan fokus analisis. Penelitian Hidayat menekankan pada dampak pelatihan BLK terhadap peningkatan keterampilan individu dan kemandirian kerja di berbagai bidang seperti otomotif, menjahit, dan teknologi informasi, tanpa membahas kaitannya dengan permasalahan *Skill Mismatch* atau relevansi antara hasil pelatihan dengan kebutuhan industri. Sedangkan penelitian saya secara spesifik berfokus pada evaluasi pelatihan vokasi di BPVP Aceh dengan menggunakan model evaluasi CIPP untuk melihat efektivitas pelatihan dalam mengurangi *skill mismatch* di tingkat regional. Dengan demikian, penelitian saya melengkapi penelitian Hidayat dengan memberikan analisis evaluatif dan kontekstual

¹³ Nana Ismelani Ayi Najmul Hidayat, "Peran Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Keterampilan Masyarakat," *Journal of Social Humanities and Education* 1, no. 4 (2022): 181–90.

terhadap peran BLK dalam meningkatkan kesesuaian antara keterampilan peserta dan kebutuhan pasar kerja di daerah.

Gap Penelitian:

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pelatihan vokasi dan peran Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan keterampilan serta peluang kerja masyarakat. Penelitian Stevanus Agung Wibowo (2022) mengevaluasi program pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan pada masa pandemi dengan model CIPP, namun belum secara khusus mengkaji kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri pada konteks daerah. Penelitian Arif Maulana dan Nugrahayu Suryaningrum (2023) menganalisis hubungan pendidikan vokasi, pelatihan, dan pengangguran usia muda secara nasional dengan pendekatan kuantitatif, tetapi belum mengevaluasi pelaksanaan program pelatihan pada lembaga vokasi tertentu. Sementara itu, penelitian A.N. Hidayat (2022) membahas peran Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, namun belum secara khusus mengevaluasi program pelatihan menggunakan model CIPP dan belum menempatkan *skill mismatch* sebagai fokus analisis. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengevaluasi program pelatihan vokasi pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh berdasarkan aspek *context*, *input*, *process*, dan *product* dalam upaya meningkatkan kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, dengan mempertimbangkan karakteristik pasar kerja di Aceh.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Evaluasi

Teori evaluasi program pelatihan vokasi yang relevan digunakan adalah model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini memberikan kerangka sistematis untuk menilai

keberhasilan pelatihan mulai dari aspek konteks yaitu latar belakang, tujuan, hingga kebutuhan pelatihan yang harus dipenuhi agar relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, evaluasi input menilai semua sumber daya yang digunakan dalam pelatihan seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan materi pelatihan. Evaluasi proses mengamati pelaksanaan pelatihan apakah berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, serta keterlibatan peserta selama pelatihan. Akhirnya, evaluasi produk menilai hasil akhir dari pelatihan, khususnya pencapaian kompetensi peserta yang harus sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mampu mengurangi kesenjangan keterampilan atau skill mismatch. Dengan menggunakan model ini, evaluasi pelatihan dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas program pelatihan vokasi.¹⁴

2.2.2 Konsep Pelatihan Vokasi

Pelatihan vokasi sendiri merupakan suatu proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang secara khusus untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis dan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh dunia industri. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai dengan kemampuan yang sesuai kebutuhan pasar kerja saat ini, sehingga pelatihan vokasi menjadi alat strategis dalam mengatasi masalah pengangguran terutama yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan industri, yang dikenal dengan istilah *Skill Mismatch*. Dengan demikian, pelatihan vokasi tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga memastikan relevansi

¹⁴ Putri Intan Ainiyyah Ruswandi, "Implementasi Model Evaluasi CIPP Dalam Pelaksanaan Program Pelatihan Vokasi Bagi Masyarakat Tahun 2023 Di PPSDM KEBTKE," *Universitas Pendidikan Indonesia* 4, no. 1 (2024): 9–15.

dan adaptabilitas keterampilan yang diajarkan terhadap tuntutan pasar tenaga kerja yang dinamis.¹⁵

Balai Latihan Kerja (BLK) memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, produktif, dan siap menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja. Sebagai lembaga pelatihan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, BLK bertugas menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan standar industri. Peran utama BLK adalah sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, memastikan agar tenaga kerja memiliki kemampuan teknis (*hard skills*) dan keterampilan non-teknis (*soft skills*) yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja.

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Permenaker Nomor 6 Tahun 2025), pelatihan yang diselenggarakan BLK harus berorientasi pada kompetensi dan kebutuhan industri. Pelatihan berbasis kompetensi ini mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dengan instruktur bersertifikat, serta sertifikasi keahlian sebagai bukti penguasaan keterampilan peserta. Dengan demikian, BLK berperan sebagai pusat pengembangan tenaga kerja berbasis industri yang mendorong terciptanya tenaga kerja siap pakai di berbagai sektor. Selain meningkatkan kompetensi teknis tenaga kerja, BLK juga berperan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja nasional. Melalui program pelatihan seperti *BLK Komunitas* dan *Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)*, pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi, terutama bagi kelompok rentan seperti pemuda, perempuan, dan masyarakat pedesaan. Program BLK Komunitas, misalnya, telah didirikan di

¹⁵ Nora Azkia, "Analisis Peranan Pelatihan Vokasi Oleh BPVP Banda Aceh Dalam Peningkatan Kapasitas Keterampilan Pengangguran Terdidik Lulusan Perguruan Tinggi Di Kota Banda Aceh," 2023, 1–9.

berbagai pesantren, organisasi masyarakat, dan lembaga sosial untuk memberikan pelatihan praktis yang sesuai dengan potensi ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, BLK berperan sebagai motor penggerak pengembangan SDM melalui tiga fungsi utama:

1. Fungsi pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan keterampilan praktis kepada masyarakat agar siap kerja;
2. Fungsi sertifikasi kompetensi, sebagai bukti pengakuan atas keahlian tenaga kerja; dan fungsi pemberdayaan ekonomi, yaitu membantu menciptakan wirausaha baru yang mandiri.

2.2.3 Konsep Skill Mismatch

Konsep skill mismatch menjelaskan kondisi di mana terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Hal ini dapat berupa mismatch dalam tingkat keterampilan (*overqualified* atau *underqualified*), jenis keterampilan (*hard skill* atau *soft skill*), maupun bidang keahlian yang dimiliki tidak relevan dengan pekerjaan yang tersedia. Skill mismatch dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja serta berkontribusi pada tingginya angka pengangguran terdidik. Oleh karena itu, pelatihan vokasi yang efektif harus didesain secara tepat agar mengidentifikasi kebutuhan industri secara akurat dan menghasilkan tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan sehingga mampu memperkecil gap atau mismatch ini.¹⁶

¹⁶ Pardjono Arif Wijayanta, "Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Unit Pelaksana Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktifitas (BBPVP) Bandung," *Jurnal Karya Ilmiah Guru* 10, no. 3 (2025): 1861–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i3.2068>.

2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini berada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh (dahulu dikenal sebagai Balai Latihan Kerja Aceh). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BPVP Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) utama di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi di wilayah Provinsi Aceh. Sebagaimana diketahui dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, kondisi ketenagakerjaan daerah masih menghadapi tantangan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 5,56 persen (sekitar 145 ribu orang menganggur dari total 2,60 juta angkatan kerja). Angka ini tercatat masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pelatihan vokasi di BPVP Aceh dilaksanakan dan sejauh mana pelatihan tersebut berpengaruh terhadap pengurangan skill mismatch. Metode ini menggali makna dan realitas sosial berdasarkan pandangan informan, serta menafsirkan hasil pelatihan dari konteks implementasi kebijakan, proses pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap tenaga kerja.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara

saling melengkapi untuk memperoleh data yang akurat, valid, dan sesuai dengan fokus penelitian.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai kondisi nyata pelaksanaan pelatihan vokasi di BPVP Aceh. Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti melakukan observasi terhadap beberapa aspek penting, seperti: kondisi sarana dan prasarana pelatihan, proses pelaksanaan pelatihan, partisipasi peserta, serta hubungan antara BPVP Aceh dan pihak industri.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan yang memiliki pengalaman dan pemahaman terkait pelatihan vokasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang isu yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada Kepala Seksi Pelatihan di BPVP Aceh, instruktur pelatihan, peserta pelatihan (lulusan), dan perwakilan dunia industri mitra BLK. Setiap hasil wawancara direkam (dengan izin narasumber) dan ditranskripsikan untuk dianalisis menggunakan teknik reduksi data.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari dokumen, laporan, atau arsip yang relevan. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan bukti tertulis seperti laporan resmi, arsip, atau data digital. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain: laporan kegiatan pelatihan dari BPVP Aceh, data statistik ketenagakerjaan dari BPS, laporan realisasi program pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan, dokumen kebijakan seperti Permenaker No. 6 Tahun 2025, serta data internal BPVP Aceh mengenai jumlah peserta, jenis pelatihan, tingkat sertifikasi, dan data penyerapan kerja.

3.4 Informan Penelitian

Informan didefinisikan sebagai individu yang memberikan informasi.¹⁷ Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus evaluasi CIPP. Kriteria informan meliputi: (1) Koordinator Penyelenggaraan, yaitu pihak yang memiliki wewenang dalam kebijakan dan operasional pelatihan; (2) Instruktur, yaitu pihak yang memahami proses pembelajaran teknis, materi, serta pelaksanaan kurikulum pelatihan; (3) Lulusan pelatihan, yaitu peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan memiliki pengalaman setelah mengikuti program, baik bekerja maupun berwirausaha; dan (4) Koordinator Pemberdayaan, yaitu pihak yang memiliki pengetahuan mengenai proses pemberdayaan dan tindak lanjut terhadap lulusan setelah mengikuti pelatihan.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Alasan Memilih Informan
1	Kepala Koordinator Penyelenggaraan	1 Orang	Mengetahui kebijakan dan pelaksanaan pelatihan vokasi
2	Instruktur Pelatihan	1 Orang	Mengetahui proses teknis dan hambatan selama pelatihan
3	Peserta Pelatihan (Lulusan)	3 Orang	Menggambarkan manfaat dan kendala pelatihan secara langsung

¹⁷ INewsBekasi.id, "Informan Penelitian Kualitatif Menurut Sugiyono: Panduan Lengkap," n.d., <https://bacalagers.com/informan-penelitian-kualitatif-menurut-sugiyono/>.

4	Kepala Koordinator Pemberdayaan	1 Orang	Memberikan informasi mengenai pemberdayaan dan perkembangan lulusan setelah mengikuti pelatihan.
---	------------------------------------	---------	--

3.5 Sumber Data

Sumber data Penelitian terdiri atas:

1. Data Primer, diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi di BPVP Aceh. Data ini digunakan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pelatihan, kendala yang dihadapi, serta sejauh mana pelatihan dapat mengurangi *skill mismatch* di Aceh.
2. Data Sekunder, diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan tahunan, data statistik BPS, kebijakan pemerintah, dan arsip lembaga terkait pelatihan vokasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan artikel ilmiah dan laporan penelitian terdahulu untuk memperkuat hasil analisis.

3.6 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (1992) dengan tiga langkah utama:

- 1). Reduksi Data, adalah proses penyaringan data dengan cara memilih informasi yang penting dan relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data lebih terarah serta mudah dipahami dalam proses analisis.
- 2). Penyajian Data (*Display Data*), yaitu menampilkan data yang sudah direduksi dalam bentuk narasi dan tabel sehingga membantu penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan program pelatihan vokasi serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian program berdasarkan empat komponen evaluasi CIPP, yaitu *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*.

3). Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*), yaitu menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam, meliputi evaluasi konteks, masukan, proses, dan hasil untuk mengetahui sejauh mana program pelatihan vokasi dapat berkontribusi dalam mengatasi *skill mismatch*.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan program pelatihan vokasi dan produktivitas di BPVP Banda Aceh.¹⁸ Penerapan secara konkret dilakukan dengan membandingkan dan menyandingkan data hasil wawancara dari sudut pandang instansi penyelenggara dan pihak yang terlibat langsung, yaitu: Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh selaku penyelenggara program, alumni/peserta pelatihan selaku penerima manfaat, serta Koordinator Pemberdayaan selaku pihak yang mengetahui proses pemberdayaan dan tindak lanjut terhadap lulusan setelah mengikuti pelatihan.

3.8 Fokus Penelitian

Tabel 3.2 Fokus Penelitian

Komponen CIPP	Indikator	SubFokus Penelitian	Sumber Data
Context (Konteks)	Kebutuhan dan Tujuan Program	Kesesuaian tujuan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri di Aceh	Koordinator Penyelenggaraan, Dokumen
Input (Masukan)	Sumber Daya Manusia, Sarana, Materi	Kompetensi instruktur, pengalaman instruktur, kecukupan jumlah instruktur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta	Koordinator Penyelenggaraan, Instruktur, Dokumen dan peserta

¹⁸ M. Husnulloil et al., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

		kesesuaian materi pelatihan dalam mendukung pelaksanaan program	
Process (Proses)	Pelaksanaan Program	Pelaksanaan pembelajaran sesuai jadwal, penerapan metode pembelajaran teori dan praktik, interaksi instruktur dengan peserta, keaktifan peserta selama pelatihan, evaluasi pembelajaran, serta pelaksanaan dan monitoring kegiatan magang	Instruktur, Peserta Lulusan, Koordinator Pemberdayaan
Product (Hasil)	Kompetensi Lulusan	Peningkatan keterampilan peserta, kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, dan kontribusi pelatihan dalam mengurangi skill mismatch	Peserta Lulusan, Koordinator Pemberdayaan

Sumber: Olahan Peneliti 2026

3.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 8 Bulan, dimulai dari bulan Januari 2026 yaitu dilakukan penyusunan proposal penelitian dan revisi proposal. Selanjutnya sidang skripsi beserta revisinya pada bulan Agustus 2026 yang dilakukan dengan perbaikan skripsi sesuai dengan arahan pembimbing penelitian.

3.10 Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan: Bab ini menguraikan dasar pelaksanaan penelitian yang mencakup latar belakang penelitian, permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, serta batasan penelitian sebagai ruang lingkup kajian.
2. BAB II Tinjauan Pustaka: Uraian ini berisi teori-teori pendukung, ringkasan dari penelitian terdahulu yang relevan, konsep dasar yang digunakan, dan jalan pikiran (kerangka berpikir) dalam penelitian.

3. BAB III Metodologi Penelitian: Uraian ini menguraikan langkah dan cara kerja penelitian secara jelas, mulai dari bentuk penelitian, lokasi, sumber data, cara mengumpulkan data, hingga cara menganalisisnya.
4. BAB IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini menampilkan data yang didapat dari lapangan (melalui wawancara, pengamatan, dan dokumen). Data tersebut lalu diolah dan dibahas dengan mengaitkannya pada teori serta rumusan masalah.
5. BAB V Penutup: Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dan referensi untuk penelitian berikutnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Singkat Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, serta pengembangan produktivitas tenaga kerja. Kehadiran BPVP Aceh bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja, sehingga mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja di tingkat regional maupun nasional.

Dalam perkembangannya, BPVP Aceh terus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar kerja melalui penyelenggaraan berbagai program pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan tersebut disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional, maupun standar khusus yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Selain itu, BPVP Aceh juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, perusahaan, lembaga, pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelatihan serta memperluas kesempatan kerja bagi lulusan pelatihan.



Gambar 4.1 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh

Selain berfokus pada peningkatan keterampilan teknis (*hard skill*), BPVP Aceh juga memberikan pembelajaran mengenai keterampilan nonteknis (*soft skill*), pembentukan karakter kerja, disiplin, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kewirausahaan. Hal tersebut bertujuan agar lulusan tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memiliki peluang untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

Sebagai lembaga pelatihan pemerintah, BPVP Aceh juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dunia kerja, lembaga sertifikasi profesi, serta instansi terkait lainnya. Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan uji kompetensi, program pemagangan, hingga penempatan lulusan ke dunia kerja. Dengan demikian, BPVP Aceh tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi juga sebagai penghubung antara pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia kerja.

4.1.2. Visi dan Misi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, BPVP Aceh memiliki visi untuk mewujudkan tenaga kerja yang

kompeten, produktif, berdaya saing, dan mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi.

“Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPVP Aceh menjalankan beberapa misi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
5. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
6. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan misi tersebut menjadi pedoman bagi BPVP Aceh dalam menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi serta mengembangkan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan vokasi di BPVP Aceh diharapkan dapat mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta mengatasi kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*) antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja.

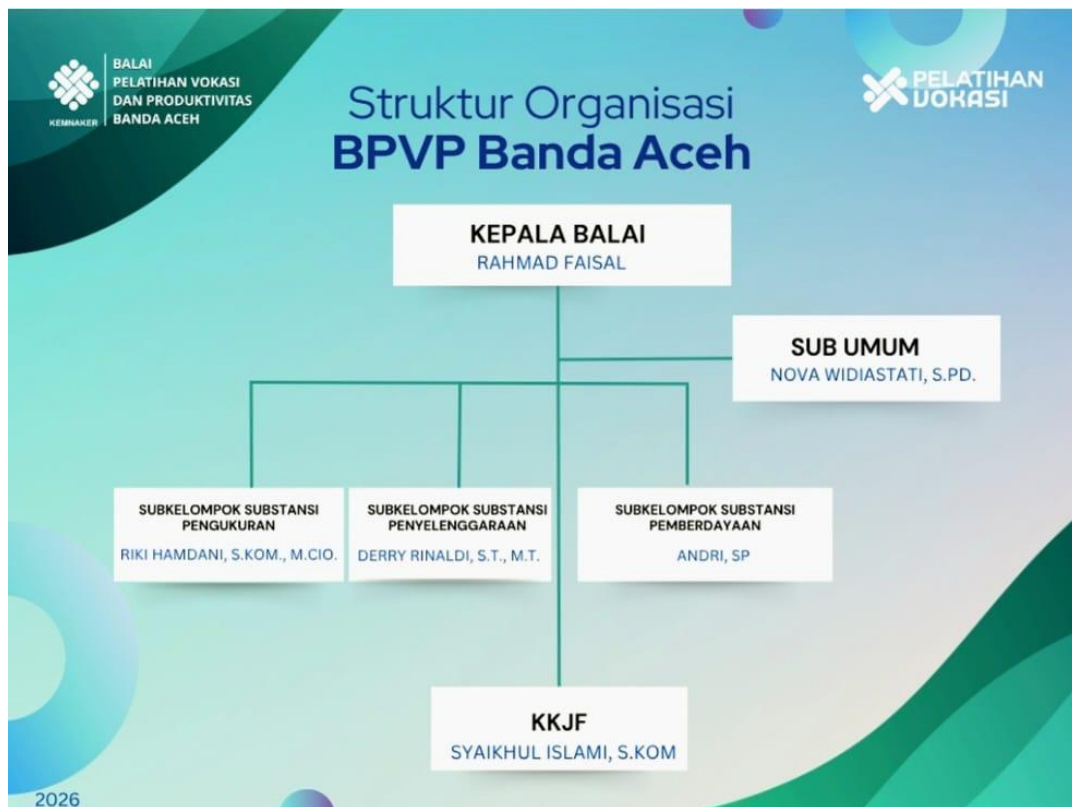
4.1.3. Struktur Organisasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh

Struktur organisasi BPVP Aceh juga berperan penting dalam menciptakan koordinasi yang efektif antarunit kerja sehingga setiap tahapan penyelenggaraan pelatihan dapat terlaksana secara sistematis. Mulai dari proses identifikasi kebutuhan pelatihan, penyusunan program, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan uji kompetensi, hingga penempatan lulusan, seluruh kegiatan melibatkan unit kerja yang saling berkoordinasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Koordinasi yang baik antarunit tersebut mendukung terciptanya penyelenggaraan pelatihan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan.

Selain menjalankan fungsi administratif, setiap unit dalam struktur organisasi BPVP Aceh juga memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kompetensi peserta pelatihan. Koordinator penyelenggaraan pelatihan bertanggung jawab memastikan program pelatihan berjalan sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi yang telah ditetapkan, sedangkan Koordinator Pemberdayaan berperan dalam menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia kerja serta memfasilitasi penempatan lulusan. Di sisi lain, instruktur sebagai jabatan fungsional memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan materi, membimbing praktf, serta mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta selama proses pelatihan berlangsung.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang terstruktur, BPVP Aceh diharapkan mampu menyelenggarakan pelatihan vokasi yang berkualitas, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan mengatasi kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*) di Provinsi Aceh.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi (BPVP)

4.1.4. Program Pelatihan Vokasi BPVP Aceh

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh menyelenggarakan berbagai program pelatihan vokasi berbasis kompetensi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Program pelatihan tersebut dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja pada peserta sehingga mampu bersaing di pasar kerja maupun menciptakan peluang usaha mandiri. Seluruh program pelatihan yang diselenggarakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga materi pembelajaran yang diberikan telah disesuaikan dengan standar kompetensi yang berlaku secara nasional.

Penyelenggaraan pelatihan BPVP Aceh dilakukan secara berkala setiap tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan dunia kerja. Sebelum menentukan jenis pelatihan yang akan dibuka, BPVP Aceh terlebih dahulu

melaksanakan *Training Need Analysis* (TNA) atau analisis kebutuhan pelatihan. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kompetensi yang sedang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia kerja sehingga program pelatihan yang diselenggarakan memiliki relevansi dengan kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, BPVP Aceh juga memanfaatkan data ketenagakerjaan, perkembangan sektor industri, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pelatihan.

Program pelatihan yang diselenggarakan BPVP Aceh mencakup berbagai kejuruan yang disesuaikan dengan potensi ekonomi daerah dan kebutuhan pasar kerja. Beberapa kejuruan yang tersedia antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Otomotif, Teknik Listik, Pengelasan (*Welding*), Refrigerasi, Garmen Apparel, Konstruksi, Manufaktur, Bisnis dan Manajemen, serta industri kreatif. Selain kejuruan tersebut, BPVP Aceh juga menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan membekali peserta dengan kemampuan mengelola usaha secara mandiri. Keberagaman program pelatihan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih bidang kompetensi yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan dunia kerja.

Dalam pelaksanaannya, BPVP Aceh menerapkan sistem pelatihan berbasis kompetensi (*Competency Based Training*). Sistem ini berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta melalui pembelajaran teori dan praktik. Proporsi praktik diberikan lebih besar dibandingkan teori agar peserta memperoleh pengalaman langsung dalam mengoperasikan peralatan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar industri, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan yang telah dipelajari ketika memasuki dunia kerja.

Selain materi teknis sesuai dengan masing-masing jurusan, peserta juga memperoleh materi pendukung yang bertujuan meningkatkan kesiapan kerja. Materi tersebut meliputi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), komunikasi di lingkungan kerja, pembentukan karakter kerja, pengembangan keterampilan nonteknis (*soft skill*), serta kewirausahaan. Pemberian materi pendukung tersebut diharapkan dapat membentuk tenaga kerja yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu berkomunikasi, bekerja sama, beradaptasi, serta mampu menghadapi dinamika lingkungan kerja.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan, peserta diwajibkan mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bersama asesor kompetensi yang telah memiliki sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Uji kompetensi dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi sebagai pengakuan resmi atas kemampuan yang dimiliki, sedangkan peserta yang belum memenuhi standar kompetensi diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Sebagai bentuk penguatan pengalaman kerja, BPVP Aceh juga mendorong peserta untuk mengikuti program pemagangan setelah menyelesaikan pelatihan. Program magang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menerapkan kompetensi yang telah diperoleh secara langsung di dunia usaha dan dunia kerja. Melalui pengalaman tersebut, peserta dapat memahami budaya kerja, meningkatkan keterampilan praktis, serta memperoleh pengalaman yang menjadi nilai tambah ketika memasuki pasar kerja. Secara keseluruhan, program pelatihan vokasi yang diselenggarakan BPVP Aceh tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, mengatasi

kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*) antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, penyelenggaraan program pelatihan vokasi di BPVP Aceh menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan siap menghadapi tantangan perkembangan dunia kerja.

4.1.5. Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Ketersediaan fasilitas yang memadai tidak hanya menunjang kelancaran proses pembelajaran, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga peserta dapat mengembangkan kompetensinya secara optimal. Oleh karena itu, BPVP Aceh terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan serta perkembangan teknologi yang digunakan di dunia usaha dan dunia kerja.

Sebagai lembaga pelatihan vokasi milik pemerintah, BPVP Aceh memiliki berbagai fasilitas pembelajaran yang dirancang untuk mendukung kegiatan pelatihan baik secara teori maupun praktik. Fasilitas tersebut meliputi ruang kelas yang digunakan untuk penyampaian materi pembelajaran, bengkel praktik sesuai dengan masing-masing kejuruan, laboratorium komputer, ruang instruktur, ruang administrasi, ruang rapat, perpustakaan, ruang uji kompetensi, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, BPVP Aceh juga menyediakan fasilitas umum seperti mushala, kantin, area parkir, ruang kesehatan, serta asrama bagi peserta pelatihan yang berasal dari luar daerah. Penyediaan fasilitas tersebut bertujuan agar peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan nyaman dan efektif.

Dalam setiap kejuruan pelatihan, BPVP Aceh menyediakan peralatan praktik yang disesuaikan dengan karakteristik bidang kompetensi masing-masing. Misalnya, pada kejuruan pengelasan tersedia mesin las dan perlengkapan keselamatan kerja, pada kejuruan teknik listrik tersedia panel instalasi listrik beserta alat ukurnya, sedangkan pada kejuruan teknologi informasi disediakan perangkat komputer beserta perangkat lunak pendukung. Penyediaan peralatan praktik tersebut bertujuan agar peserta memperoleh pengalaman belajar yang menyerupai kondisi kerja sebenarnya sehingga mampu menguasai kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku di dunia industri.

Selain menyediakan fasilitas fisik, BPVP Aceh juga berupaya menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap layak digunakan selama proses pelatihan berlangsung. Peralatan praktik yang digunakan secara berkala dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan untuk memastikan seluruh fasilitas berada dalam kondisi baik dan aman digunakan oleh peserta maupun instruktur. Apabila terdapat peralatan yang mengalami kerusakan atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, BPVP Aceh melakukan perbaikan maupun pengadaan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran. Upaya tersebut dilakukan agar kualitas pembelajaran tetap terjaga dan peserta memperoleh pengalaman praktik yang relevan dengan perkembangan dunia kerja.

Di samping itu, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung pelaksanaan uji kompetensi yang menjadi tahapan akhir dalam proses pelatihan. Fasilitas praktik yang tersedia memungkinkan peserta menunjukkan kemampuan sesuai dengan unit-unit kompetensi yang diujikan. Hasil uji kompetensi tersebut menjadi dasar dalam pemberian sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sehingga lulusan memiliki bukti pengakuan atas kompetensi yang dimiliki.

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana yang dimiliki BPVP Aceh merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelatihan vokasi. Ketersediaan fasilitas yang memadai, didukung dengan pemeliharaan serta pengembangan peralatan secara berkelanjutan, diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran, menghasilkan lulusan yang kompeten, serta mendukung tercapainya tujuan BPVP Aceh dalam menyiapkan tenaga kerja yang produktif, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja.

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana BPVP Aceh

No	Sarana/ Prasarana	Fungsi
1	Ruang kelas	Tempat pelaksanaan pembelajaran teori.
2	Bengkel praktik	Tempat pelaksanaan praktik sesuai kejuruan.
3	Laboratorium komputer	Mendukung pelatihan bidang TIK dan penggunaan aplikasi.
4	Ruang uji kompetensi	Pelaksanaan asesmen/uji kompetensi peserta.
5	Ruang instruktur	Persiapan materi dan koordinasi instruktur.
6	Ruang administrasi	Pelayanan administrasi dan pengelolaan dokumen.
7	Perpustakaan	Menyediakan referensi dan bahan bacaan pelatihan.
8	Asrama peserta	Tempat tinggal peserta dari luar daerah.
9	Mushala	Fasilitas ibadah bagi peserta dan pegawai.
10	Kantin	Menyediakan kebutuhan konsumsi peserta dan pegawai.
11	Area parkir	Tempat parkir kendaraan.
12	Peralatan praktik	Media pembelajaran untuk mengasah keterampilan sesuai standar industri.

Berdasarkan Tabel 4.1, BPVP Aceh memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran teori, praktik, serta

pelaksanaan uji kompetensi sehingga peserta memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.



Gambar 4.3 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan uraian serta dokumentasi sarana dan prasarana yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa BPVP Aceh memiliki berbagai fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Ketersediaan ruang pembelajaran, bengkel praktik, laboratorium, peralatan pelatihan, serta fasilitas penunjang lainnya menunjukkan komitmen BPVP Aceh dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta pelatihan. Sarana dan prasarana tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pelatihan sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

4.2 Peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dalam Mengatasi Skill Mismatch

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan pelatihan vokasi menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang

memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Melalui pelatihan yang berorientasi kompetensi, BPVP Aceh diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja (*skill mismatch*).

Peran tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 9 yang menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. Selain itu, pada Pasal 10 ayat (1) ditegaskan bahwa pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan dunia usaha, sedangkan Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelatihan vokasi tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan peserta, tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan.

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang menjelaskan bahwa sistem pelatihan kerja diselenggarakan secara terpadu untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing. Sebagai pelaksana kebijakan di bidang pelatihan vokasi, BPVP Aceh memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program pelatihan yang diselenggarakan relevan dengan perkembangan dunia kerja. Hal tersebut dilakukan melalui identifikasi kebutuhan pelatihan, penyusunan kurikulum

berbasis kompetensi, penyediaan instruktur dan sarana pendukung, pelaksanaan pelatihan, hingga evaluasi hasil pelatihan.

Untuk mengetahui sejauh mana peran tersebut telah terlaksana, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model evaluasi ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyelenggaraan program, mulai dari kesesuaian kebutuhan dan tujuan program (*context*), kesiapan sumber daya pendukung (*input*), pelaksanaan program (*process*), hingga hasil yang dicapai (*product*). Melalui keempat komponen tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelatihan vokasi di BPVP Aceh serta kontribusinya dalam mengatasi *skill mismatch* di Provinsi Aceh.

4.3 Evaluasi *Context* (Konteks)

Evaluasi *context* merupakan salah satu komponen dalam model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Menurut Stufflebeam (2003), evaluasi *context* bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, peluang, serta kondisi yang melatarbelakangi penyelenggaraan suatu program. Melalui evaluasi ini dapat diketahui apakah tujuan program telah sesuai dengan kebutuhan sasaran serta kondisi lingkungan tempat program dilaksanakan. Dengan demikian, evaluasi *context* menjadi dasar dalam menentukan arah, tujuan, dan prioritas program agar mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, evaluasi *context* digunakan untuk mengetahui bagaimana BPVP Aceh mengidentifikasi kebutuhan pelatihan vokasi, latar belakang penyelenggaraan program, kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja, serta peran pelatihan vokasi dalam mengurangi *skill mismatch*. Untuk

memperoleh informasi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi di BPVP Aceh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh informasi sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan BPVP Aceh, diketahui bahwa penyelenggaraan pelatihan vokasi didasarkan pada kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Aceh yang masih menghadapi tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Oleh karena itu, pelatihan vokasi diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sehingga mampu memperoleh pekerjaan maupun berwirausaha. Informan menjelaskan sebagai berikut:

"BPVP Aceh menyelenggarakan program pelatihan vokasi karena tingkat pengangguran terbuka di Aceh masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional. Oleh sebab itu, pelaksanaan pelatihan vokasi diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh."¹⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa program pelatihan vokasi di BPVP Aceh tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Selanjutnya, informan menjelaskan bahwa sebelum menentukan jenis pelatihan yang akan diselenggarakan, BPVP Aceh terlebih dahulu melaksanakan *Training Need Analysis* (TNA). Analisis tersebut dilakukan setiap akhir tahun sebagai dasar dalam menyusun program pelatihan pada tahun berikutnya. Selain itu, BPVP Aceh juga menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan dalam melihat proyeksi

¹⁹ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, mewakili Ketua BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

kebutuhan tenaga kerja sehingga program pelatihan yang diselenggarakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Informan menyampaikan sebagai berikut:

"Instruktur BPVP Aceh melaksanakan program yang disebut Training Need Analysis (TNA), yaitu analisis terhadap kebutuhan pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap akhir tahun sebelum penyusunan program kerja tahun berikutnya. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui keterampilan yang diperkirakan akan dibutuhkan pada tahun berikutnya. Selain itu, kami juga menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai proyeksi ketenagakerjaan beberapa tahun ke depan sehingga program pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tersebut."²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa BPVP Aceh telah melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan secara sistematis sebelum menetapkan jenis program pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan program pelatihan dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi tenaga kerja pada masa mendatang.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh sebagai penyelenggara pelatihan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang peserta mengikuti pelatihan serta kesesuaian program pelatihan dengan kebutuhan kompetensi peserta.

"Saya mengikuti pelatihan di BPVP Aceh karena ingin meningkatkan keterampilan di bidang barista. Sebelum mengikuti pelatihan saya memang sudah tertarik dengan dunia kopi, tetapi kemampuan yang saya miliki masih terbatas karena hanya belajar secara mandiri melalui internet dan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Oleh karena itu, saya ingin mengikuti pelatihan agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik."²¹

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelatihan vokasi di BPVP Aceh telah memberikan manfaat bagi peserta dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan

²⁰ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, mewakili Ketua BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

²¹ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

bidang pelatihan yang diikuti. Dari sisi penyelenggara, program tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja, sedangkan dari sisi lulusan, pelatihan yang diikuti dinilai mampu menambah pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan kemampuan pada bidang yang diminati. Dengan demikian, pada aspek konteks, pelatihan vokasi di BPVP Aceh telah menunjukkan kesesuaian antara tujuan program, pengembangan kompetensi peserta, dan kebutuhan dunia kerja.

Terkait kesesuaian jenis pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja, informan menjelaskan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan telah disesuaikan dengan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Aceh. Mengingat kondisi sektor industri di Aceh relatif terbatas, sebagian besar program pelatihan diarahkan untuk mendukung kewirausahaan, sedangkan beberapa pelatihan teknis seperti pengelasan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar Provinsi Aceh. Informan menjelaskan sebagai berikut:

"Jenis pelatihan yang diberikan sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Namun, karena jumlah industri di Aceh tidak terlalu banyak, sebagian besar pelatihan diarahkan untuk mendukung peserta berwirausaha, seperti pelatihan barista, coffee roasting, pembuatan roti dan kue, servis AC, menjahit, serta perbengkelan. Sementara itu, untuk pelatihan seperti pengelasan, peserta lebih banyak dipersiapkan untuk bekerja di luar Aceh. Berdasarkan hasil penempatan selama tiga tahun terakhir, lulusan lebih banyak mengarah ke wirausaha, sedangkan yang bekerja di sektor industri sebagian besar berada di luar Aceh."²²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program pelatihan vokasi telah mempertimbangkan karakteristik pasar kerja di Provinsi Aceh. Program tersebut tidak hanya difokuskan pada penempatan kerja di sektor industri, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menciptakan peluang usaha secara mandiri.

²² Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, mewakili Ketua BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

Mengenai kontribusi pelatihan dalam mengurangi *skill mismatch*, informan menjelaskan bahwa kompetensi teknis (*hard skill*) yang dimiliki lulusan pada umumnya telah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun demikian, kendala yang masih sering ditemui berkaitan dengan sikap kerja (*attitude*), seperti kurangnya kesiapan bekerja, mudah merasa bosan, serta kurang mampu bertahan di lingkungan kerja. Informan menyampaikan sebagai berikut:

"Menurut saya, pelatihan ini sudah mampu meningkatkan keterampilan peserta sehingga secara kompetensi mereka sudah baik. Namun, permasalahan yang masih sering terjadi bukan pada keterampilan, melainkan pada sikap kerja. Ada peserta yang sudah ditempatkan bekerja, tetapi kemudian berhenti karena berbagai alasan, misalnya lokasi kerja yang jauh atau merasa gaji yang diterima belum sesuai. Jadi, tantangan yang masih dihadapi lebih banyak berkaitan dengan kesiapan dan sikap kerja peserta."²³

Ditinjau dari model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam, aspek *context* menekankan pentingnya identifikasi kebutuhan, permasalahan, serta tujuan program sebelum program dilaksanakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPVP Aceh telah menerapkan proses tersebut melalui pelaksanaan *Training Need Analysis* (TNA) dan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penyusunan program pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelatihan telah mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja sehingga program yang dilaksanakan memiliki relevansi dengan kondisi ketenagakerjaan di Aceh.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa BPVP Aceh menyesuaikan jenis pelatihan dengan karakteristik dunia kerja di Provinsi Aceh. Mengingat sektor industri di Aceh masih terbatas, sebagian besar program pelatihan diarahkan untuk mendukung kewirausahaan, sedangkan beberapa pelatihan teknis dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar daerah. Strategi tersebut menunjukkan bahwa

²³ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, mewakili Ketua BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

BPVP Aceh tidak hanya berorientasi pada penempatan kerja, tetapi juga mendorong lulusan agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri melalui kegiatan berwirausaha.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Stevanus Agung Wibowo (2022) dan Arif Maulana & Nugrahayu Suryaningrum (2023) yang sama-sama menggunakan model evaluasi CIPP dalam mengevaluasi pelaksanaan program pelatihan. Persamaan tersebut terlihat pada penggunaan aspek *context* sebagai dasar untuk melihat kesesuaian program dengan kebutuhan peserta dan lingkungan eksternal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa identifikasi kebutuhan menjadi faktor penting dalam menentukan relevansi suatu program pelatihan, sebagaimana temuan dalam penelitian ini bahwa BPVP Aceh melakukan analisis kebutuhan melalui *Training Need Analysis* (TNA) dan data pendukung dalam penyusunan program pelatihan.

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena lebih memfokuskan evaluasi pada pelatihan vokasi dalam kaitannya dengan upaya mengurangi *skill mismatch*. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengevaluasi keterlaksanaan program pelatihan secara umum, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana kesesuaian antara kompetensi yang diberikan melalui pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja serta tantangan yang masih dihadapi lulusan setelah mengikuti pelatihan.

4.4 Evaluasi *Input* (Masukan)

Evaluasi *input* merupakan komponen kedua dalam model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Menurut Stufflebeam (2003), Evaluasi *input* bertujuan untuk menilai kesiapan berbagai sumber daya yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan suatu program. Komponen ini meliputi sumber daya manusia, sarana dan

prasarana, kurikulum atau materi pelatihan, mekanisme seleksi peserta, serta sumber daya lainnya yang berperan dalam menunjang keberhasilan program. Melalui evaluasi *input*, dapat diketahui apakah sumber daya yang tersedia telah memadai untuk mendukung pencapaian tujuan program pelatihan vokasi.

a. Kompetensi Instruktur

Kompetensi instruktur merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan pelatihan vokasi. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa setiap instruktur tidak hanya dituntut menguasai kompetensi teknis sesuai bidang keahliannya, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan materi pelatihan kepada peserta. Kedua kompetensi tersebut dibuktikan melalui sertifikasi yang masih berlaku.

"Instruktur yang mengajar harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan mampu menyampaikan materi pelatihan dengan baik. Kedua kemampuan tersebut wajib dimiliki oleh setiap instruktur dan dibuktikan melalui sertifikat dari BNSP. Sertifikat tersebut juga harus masih aktif karena masa berlakunya sekitar tiga tahun."²⁴

Dapat diketahui bahwa BPVP Aceh memastikan setiap instruktur memiliki kompetensi teknis dan kompetensi mengajar yang dibuktikan melalui sertifikasi profesi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas instruktur menjadi salah satu perhatian utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pelatihan vokasi.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui penilaian peserta terhadap kompetensi instruktur selama proses pelatihan berlangsung.

"Selama mengikuti pelatihan, instruktur menyampaikan materi dengan sangat baik dan mudah dipahami. Instruktur tidak hanya menjelaskan teori,

²⁴ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

tetapi juga memberikan contoh secara langsung serta membimbing peserta pada saat praktik. Dengan metode tersebut, peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan dan mampu mengikuti setiap tahapan praktik dengan baik.”²⁵

Kompetensi instruktur tidak hanya dinilai baik oleh pihak BPVP Aceh sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi juga diakui oleh peserta pelatihan, kemampuan instruktur dalam menyampaikan materi serta memberikan pendampingan selama praktik membantu peserta memahami materi pelatihan dan meningkatkan keterampilan sesuai bidang kejuruan yang diikuti.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPVP Aceh telah menyiapkan instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih berlaku. Selain itu, wawancara dengan lulusan juga menunjukkan bahwa instruktur mampu menyampaikan materi dengan baik, memberikan contoh secara langsung, serta membimbing peserta selama praktik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi instruktur sebagai salah satu sumber daya utama dalam pelaksanaan pelatihan telah mendukung tercapainya tujuan program sebagaimana yang ditekankan dalam evaluasi *input* menurut Stufflebeam.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Stevanus Agung Wibowo (2022) dan Arif Maulana & Nugrahayu Suryaningrum (2023) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, khususnya instruktur, merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pelatihan. Pada kedua penelitian tersebut, aspek *input* dievaluasi melalui kesiapan instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Temuan penelitian ini juga menunjukkan kondisi yang serupa,

²⁵ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026

yaitu BPVP Aceh telah menyiapkan instruktur yang memiliki kompetensi teknis dan kemampuan mengajar sehingga mampu mendukung proses pembelajaran selama pelatihan berlangsung.

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena evaluasi kompetensi instruktur tidak hanya didasarkan pada kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki instruktur, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman lulusan sebagai peserta pelatihan. Penilaian lulusan menunjukkan bahwa kemampuan instruktur dalam menyampaikan materi, memberikan contoh secara langsung, serta membimbing praktik menjadi faktor yang membantu peserta memahami materi dan meningkatkan keterampilan sesuai bidang pelatihan yang diikuti. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kompetensi instruktur melalui sudut pandang penyelenggara dan peserta pelatihan.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain kompetensi instruktur, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pelatihan vokasi. Sarana dan prasarana yang memadai akan membantu peserta memperoleh pengalaman belajar yang optimal, khususnya pada kegiatan praktik yang menjadi fokus utama dalam pelatihan berbasis kompetensi. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa secara umum fasilitas dan peralatan yang dimiliki BPVP Aceh sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan pelatihan. Namun, beberapa peralatan masih memerlukan perbaikan dan pembaruan agar sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan di dunia industri.

“Peralatan yang digunakan dan kondisi fasilitas secara umum sudah memadai. Namun, ada beberapa peralatan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan mengikuti perkembangan teknologi. Kendalanya adalah

ketersediaan anggaran yang belum sepenuhnya mencukupi untuk melakukan pembaruan peralatan sesuai kebutuhan saat ini.”²⁶

Dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di BPVP Aceh telah mampu mendukung pelaksanaan pelatihan. Akan tetapi, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembaruan peralatan belum dapat dilakukan secara optimal sehingga beberapa fasilitas masih memerlukan peningkatan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi industri.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan Informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui penilaian peserta terhadap sarana dan prasarana yang digunakan selama mengikuti pelatihan. Informan menyampaikan sebagai berikut:

“Menurut saya, fasilitas dan peralatan yang disediakan selama pelatihan sudah cukup lengkap. Seluruh peralatan yang digunakan untuk praktik tersedia dengan baik sehingga dapat mencoba langsung setiap materi yang diajarkan oleh instruktur. Hal tersebut membuat proses belajar menjadi lebih mudah dipahami karena kami tidak hanya menerima teori. Tetapi juga langsung mempraktikkannya.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di BPVP Aceh telah mendukung pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Ketersediaan peralatan praktik memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempraktikkan materi secara langsung sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Stevanus Agung Wibowo (2022) dan Arif Maulana & Nugrahayu Suryaningrum (2023) yang menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana

²⁶ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026

²⁷ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pelatihan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPVP Aceh telah menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran dan praktik peserta.

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya menilai ketersediaan fasilitas dari sudut pandang penyelenggara, tetapi juga mempertimbangkan penilaian lulusan sebagai pengguna fasilitas selama mengikuti pelatihan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun fasilitas secara umum telah memadai, masih terdapat beberapa peralatan yang memerlukan pembaruan agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelatihan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sarana dan prasarana berdasarkan perspektif penyelenggara dan peserta pelatihan.

c. Kesesuaian Materi Pelatihan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Materi pelatihan merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pelatihan vokasi. Materi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa materi pelatihan di BPVP Aceh disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Selain mengacu pada standar tersebut, penyusunan materi juga didasarkan pada hasil *Training Need Analysis* (TNA) yang dilakukan sebelum program pelatihan diselenggarakan.

“Materi pelatihan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar tersebut disusun oleh para pemangku kepentingan sesuai bidang keahlian masing-masing. Selain itu, setiap instruktur juga melakukan *Training Need Analysis* (TNA) sehingga materi pelatihan yang

disusun benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan.”²⁸

Sebagai gambaran, setiap kejuruan di BPVP Aceh memiliki materi atau unit kompetensi yang berbeda sesuai dengan bidang pelatihannya. Ringkasan materi pada masing-masing kejuruan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Ringkasan Materi Pelatihan pada Setiap Program Pelatihan di BPVP Aceh

No.	Kejuruan/Program Pelatihan	Contoh Materi/Unit Kompetensi
1	Barista	Pengetahuan dasar kopi, teknik espresso, manual brewing, latte art
2	Coffee Roasting	Karakteristik biji kopi, roasting, pengoperasian roaster, cupping, pengemasan
3	Pembuatan Roti dan Kue	Sanitasi dan higiene, pengolahan adonan, pembuatan roti, kue, dekorasi, pengemasan.
4	Menjahit (Garmen Apparel)	Pengukuran badan, pembuatan pola, pemotongan kain, mesin jahit, penyelesaian busana.
5	Servis Air Conditioner (AC)	Prinsip kerja AC, instalasi, perawatan, perbaikan, pengisian refrigeran.
6	Pengelasan	K3, membaca gambar kerja, penggunaan mesin las, teknik pengelasan, pemeriksaan hasil las.
7	Perbengkelan Sepeda Motor	Perawatan berkala, sistem bahan bakar, kelistrikan, rem, transmisi, perbaikan mesin.
8	Instalasi Listrik	K3 kelistrikan; gambar instalasi, pemasangan; pengujian; pemeliharaan.
9	Operator Mesin Bubut	K3, membaca gambar teknik, alat ukur, perkakas tangan, mengoperasikan mesin bubut.

²⁸ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

10	Operator Komputer/TIK	Pengoperasian komputer, Microsoft Office, pengelolaan data, internet, administrasi digital.
11	Desain Grafis	Dasar desain, perangkat lunak desain, pengolahan gambar, media promosi, portofolio.
12	Pengolahan Hasil Pertanian/Industri Kreatif	Pengolahan produk, pengemasan, pengendalian mutu, pemasaran, kewirausahaan.

Penyusunan materi pelatihan di BPVP Aceh tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengacu pada standar kompetensi nasional serta mempertimbangkan hasil analisis kebutuhan pelatihan sehingga materi yang diberikan tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh mengenai materi pelatihan, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 2 untuk mengetahui kesesuaian materi yang diterima selama mengikuti pelatihan. Informan menjelaskan bahwa materi yang diberikan selama pelatihan tidak hanya berfokus pada keterampilan praktik, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai teori yang berkaitan dengan bidang barista. Menurut informan, materi yang dipelajari meliputi pengenalan jenis-jenis kopi, karakteristik kopi, proses pengolahan biji kopi, proses sangrai (*roasting*), teknik pengoperasian mesin espresso, hingga pembuatan *latte art*.

“Selama mengikuti pelatihan, saya tidak hanya belajar secara membuat kopi, tetapi juga mempelajari jenis-jenis kopi, karakteristik kopi dari berbagai daerah, proses pengolahan biji kopi, proses sangrai (*roasting*), teknik menggunakan mesin espresso, hingga cara membuat *latte art*. Materi yang diberikan cukup lengkap karena tidak hanya mengajarkan praktik, tetapi juga

menjelaskan dasar-dasar pengetahuan yang diperlukan dalam bidang barista.”²⁹

Materi pelatihan yang diberikan BPVP Aceh telah mencakup aspek teori maupun praktik sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada bidang barista. Penyampaian materi secara menyeluruh memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami proses kerja secara utuh sehingga keterampilan yang diperoleh tidak hanya sebatas pada kemampuan teknis, tetapi juga didukung oleh pemahaman mengenai konsep dan prosedur kerja pada bidang tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa materi pelatihan di BPVP Aceh telah disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta hasil *Training Need Analysis* (TNA). Selain itu, materi pelatihan didukung dengan penyediaan modul dan penyampaian yang mudah dipahami oleh peserta melalui kombinasi pembelajaran teori dan praktik. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi pelatihan di BPVP Aceh telah disusun sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan pelatihan sehingga mampu mendukung peserta dalam menguasai kompetensi yang dibutuhkan. Dengan demikian, materi pelatihan yang digunakan telah memenuhi aspek

d. Proses Seleksi Peserta Pelatihan

Proses pendaftaran dan seleksi peserta merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi. Melalui tahapan tersebut, penyelenggara dapat memastikan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa proses pendaftaran dan seleksi peserta saat ini telah menggunakan aplikasi SIAPKerja dan dilakukan melalui sistem yang ditetapkan oleh Balai Vokasi

²⁹ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

Nasional. Selain memenuhi persyaratan administrasi, calon peserta juga mengikuti beberapa tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes teori, dan wawancara.

"Proses seleksi peserta saat ini menggunakan aplikasi SIAPKerja. Untuk pelaksanaannya diatur melalui sistem Balai Vokasi Nasional. Persyaratan minimal peserta adalah lulusan SMA/ sederajat. Setelah itu peserta mengikuti beberapa tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes teori, dan wawancara."³⁰

Proses seleksi peserta di BPVP Aceh telah dilakukan secara sistematis melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Tahapan seleksi tersebut bertujuan untuk memperoleh peserta yang memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan mengikuti pelatihan vokasi. Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman peserta selama mengikuti proses pendaftaran pelatihan. Informan menjelaskan sebagai berikut:

"Menurut saya proses pendaftarannya sangat mudah. Sebelum mendaftar saya melihat informasi yang dibagikan di BPVP Aceh melalui media sosial dan website. Di sana sudah ada penjelasan mengenai syarat-syarat, cara mendaftar, dan tahapan yang harus diikuti. Jadi saya hanya tinggal mengikuti petunjuk yang sudah diberikan dan tidak mengalami kesulitan selama proses pendaftaran."³¹

Dapat diketahui bahwa proses pendaftaran pelatihan di BPVP Aceh dinilai mudah oleh peserta. Kemudahan tersebut didukung oleh penyampaian informasi yang jelas melalui media sosial dan website sehingga calon peserta dapat memahami tahapan

³⁰ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

³¹ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

pendaftaran serta memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti pelatihan. Penyediaan informasi melalui media digital juga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi mengenai program pelatihan yang diselenggarakan oleh BPVP Aceh.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPVP Aceh telah menyediakan prosedur pendaftaran yang mudah diakses melalui media sosial dan website serta menerapkan tahapan seleksi sebelum pelatihan dilaksanakan. Kemudahan akses informasi yang dirasakan oleh peserta menunjukkan bahwa penyelenggara telah memberikan layanan pendaftaran yang jelas dan mudah dipahami. Dengan demikian, mekanisme penerimaan peserta di BPVP Aceh mencerminkan kesiapan penyelenggara dalam mendukung pelaksanaan pelatihan vokasi sebagaimana yang ditekankan dalam aspek *input* pada model evaluasi CIPP.

Ditinjau dari model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam, hasil penelitian pada aspek *input* menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelatihan vokasi di BPVP Aceh telah didukung oleh berbagai sumber daya yang cukup memadai, meliputi kompetensi instruktur, sarana dan prasarana, materi pelatihan, serta proses seleksi peserta. Kompetensi instruktur telah sesuai dengan bidang keahlian dan didukung sertifikasi yang masih berlaku, sementara peserta juga menilai instruktur mampu menyampaikan materi dan membimbing kegiatan praktik dengan baik. Sarana dan prasarana secara umum telah mendukung kegiatan pelatihan dan praktik, meskipun masih terdapat beberapa peralatan yang perlu diperbaiki dan diperbarui sesuai perkembangan teknologi. Materi pelatihan juga telah disusun berdasarkan SKKNI dan hasil *Training Need Analysis* (TNA), sehingga sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, proses pendaftaran dan seleksi peserta telah dilakukan secara sistematis melalui seleksi administrasi, tes teori, dan wawancara untuk memastikan

kesiapan peserta mengikuti pelatihan. Dengan demikian, jika ditinjau dari model evaluasi CIPP Stufflebeam, aspek *input* pada program pelatihan vokasi di BPVP Aceh dapat dikatakan telah memenuhi kesiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program, meskipun masih diperlukan peningkatan pada beberapa sarana dan peralatan agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek input dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi di BPVP Aceh telah didukung oleh berbagai sumber daya yang memadai, meliputi kompetensi instruktur, sarana dan prasarana, materi pelatihan, serta mekanisme pendaftaran dan seleksi peserta. Ketersediaan sumber daya tersebut menunjukkan bahwa BPVP Aceh telah memiliki kesiapan yang cukup dalam mendukung pelaksanaan pelatihan vokasi sesuai dengan tujuan program.

4.5 Evaluasi *Process* (Proses)

Evaluasi process merupakan komponen ketiga dalam model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Evaluasi process bertujuan untuk menilai pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama program berlangsung, serta memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi process, yang dapat diketahui apakah pelaksanaan program telah berjalan secara efektif serta mampu mendukung pencapaian tujuan program. Dalam penelitian ini, evaluasi process dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelatihan vokasi di BPVP Aceh, meliputi kesesuaian pelaksanaan pelatihan dengan rencana, metode pembelajaran yang digunakan, tingkat keaktifan peserta, kendala yang dihadapi selama pelatihan, serta pelaksanaan kegiatan magang setelah pelatihan selesai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan BPVP Aceh, diperoleh informasi sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Pelatihan Sesuai dengan Rencana

Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan rencana merupakan salah satu indikator dalam aspek *process* yang menunjukkan sejauh mana program dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana menjadi penting karena dapat memengaruhi pencapaian tujuan program pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan di BPVP Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan secara serentak di seluruh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Indonesia. Pada tahun pelaksanaan penelitian, BPVP Aceh menyelenggarakan pelatihan dalam tiga gelombang (*batch*). Informan menjelaskan sebagai berikut:

"Pelatihan telah dilaksanakan secara serentak di seluruh UPT Indonesia. Tahun ini pelaksanaan pelatihan dibagi menjadi tiga batch, yaitu batch pertama pada bulan April, batch kedua pada bulan Juni, dan batch ketiga pada bulan Juli. Seluruh tahapan pelaksanaan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan."³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelatihan di BPVP Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan secara bertahap dalam tiga gelombang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan telah mengikuti jadwal yang telah disusun sehingga tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara teratur sesuai dengan perencanaan program.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan Informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui penilaian

³² Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

peserta terhadap pelaksanaan pelatihan yang diikuti. Informan menjelaskan sebagai berikut:

“Iya, menurut saya pelatihan yang saya ikuti sudah berjalan sesuai dengan harapan. Semua kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, mulai dari penyampaian materi sampai praktik. Instruktur juga membimbing peserta dengan baik sehingga saya bisa mengikuti setiap proses pembelajaran dengan mudah. Selama mengikuti pelatihan saya merasa mendapatkan pengalaman baru dan keterampilan yang memang saya harapkan ketika pertama kali mendaftar di BPVP Aceh.”³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelatihan dinilai telah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan peserta. Selama mengikuti pelatihan, peserta memperoleh materi dan praktik sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan tidak hanya terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan harapan peserta.

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelatihan vokasi di BPVP Aceh telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari sisi penyelenggara, pelaksanaan program dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun melalui beberapa gelombang pelatihan, sedangkan dari sisi peserta, pelaksanaan pelatihan dinilai telah berjalan dengan baik serta memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan harapan. Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan di BPVP Aceh menunjukkan kesesuaian antara perencanaan program dengan pelaksanaan di lapangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan di BPVP Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan memperoleh tanggapan positif dari peserta. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program

³³ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

telah sesuai dengan perencanaan sehingga mencerminkan pelaksanaan program yang efektif sebagaimana ditekankan dalam aspek *process* pada model evaluasi CIPP.

b. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan peserta dalam menguasai kompetensi yang diberikan selama pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa BPVP Aceh menerapkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), dengan komposisi pembelajaran sekitar 30% teori dan 70% praktik. Selain itu, pelatihan juga menanamkan sikap kerja (*work attitude*) kepada peserta. Dari segi pelaksanaan, metode yang digunakan terdiri atas pelatihan secara *offline* dan *blended learning* (*Project Based Learning*).

"Pelatihan menggunakan sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Porsi teori sekitar 30 persen, sedangkan praktik sekitar 70 persen. Selain itu juga diberikan pembelajaran mengenai sikap kerja. Metode pelaksanaannya terdiri atas *offline* dan *blended learning* atau *Project Based Learning*."³⁴

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa BPVP Aceh menerapkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan komposisi pembelajaran sekitar 30% teori dan 70% praktik. Selain berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis peserta juga diberikan pembelajaran mengenai sikap kerja (*work attitude*). Dari segi pelaksanaan, pembelajaran dilakukan secara *offline* maupun *blended learning* melalui pendekatan *Project Based Learning*. Selain penguasaan kompetensi teknis, pembelajaran juga mencakup penguatan sikap kerja (*work attitude*) sebagai bekal peserta dalam memasuki dunia kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran di BPVP Aceh tidak hanya berorientasi pada peningkatan *hard skill*, tetapi juga memperhatikan pengembangan *soft skill* peserta. Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan Informan 2 selaku

³⁴ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman peserta terhadap metode pembelajaran yang diterapkan selama mengikuti pelatihan. Informan menjelaskan sebagai berikut:

“Metode pembelajarannya dilakukan dengan teori dan praktik. Biasanya pada pagi hari kami menerima materi teori terlebih dahulu, kemudian setelah istirahat, shalat, dan makan (ishoma), kegiatan dilanjutkan dengan praktik. Menurut saya cara seperti ini membuat materi lebih mudah dipahami karena setelah mendapatkan penjelasan kami langsung mempraktikkannya.”³⁵

Dapat diketahui bahwa metode pembelajaran yang diterapkan selama pelatihan dinilai efektif oleh peserta. Penyampaian materi teori yang dilanjutkan dengan praktik secara langsung memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami materi sekaligus menerapkan pengetahuan yang diperoleh pada hari yang sama. Pola pembelajaran tersebut membantu peserta lebih mudah menguasai keterampilan sesuai dengan bidang pelatihan yang diikuti.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPVP Aceh menerapkan metode pembelajaran melalui kombinasi teori dan praktik dengan porsi praktik yang lebih dominan. Selain itu, peserta juga menilai bahwa metode tersebut memudahkan pemahaman materi karena teori yang diperoleh dapat langsung diterapkan dalam kegiatan praktik. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan telah mendukung pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana ditekankan dalam aspek *process* pada model evaluasi CIPP.

³⁵ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

c. Keaktifan Peserta Selama Pelatihan

Keaktifan peserta menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa peserta menunjukkan tingkat keaktifan yang tinggi selama mengikuti pelatihan. Hal tersebut terlihat dari tingkat kehadiran peserta pada kegiatan apel pagi yang mencapai sekitar 90–95 persen.

"Peserta sangat aktif mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari kehadiran pada kegiatan apel pagi yang mencapai sekitar 90 sampai 95 persen. Oleh karena itu, saya menilai peserta cukup aktif selama mengikuti pelatihan."³⁶

Dapat diketahui bahwa peserta menunjukkan partisipasi yang baik selama mengikuti pelatihan. Tingginya tingkat kehadiran peserta pada setiap kegiatan mencerminkan komitmen peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan yang telah diselenggarakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peserta memiliki komitmen untuk mengikuti setiap tahapan pelatihan sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bentuk keaktifan peserta selama mengikuti pelatihan. Informan menjelaskan sebagai berikut:

"Selama mengikuti pelatihan saya sering bertanya pada setiap materi yang diajarkan oleh instruktur. Kalau ada materi atau praktik yang belum saya pahami, saya langsung bertanya supaya lebih mengerti. Menurut saya, dengan sering bertanya saya jadi lebih mudah memahami materi yang diberikan dan lebih percaya diri ketika praktik."³⁷

³⁶ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

³⁷ Lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peserta tidak hanya hadir dalam setiap kegiatan pelatihan, tetapi juga berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran berlangsung.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta pelatihan di BPVP Aceh memiliki tingkat kehadiran yang tinggi serta aktif berinteraksi dengan instruktur melalui kegiatan tanya jawab selama pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pelatihan telah mendorong partisipasi aktif peserta sehingga mendukung pencapaian tujuan pelatihan sesuai dengan aspek *process* dalam model evaluasi CIPP.

d. Kendala Selama Pelaksanaan Pelatihan

Kendala selama pelaksanaan pelatihan merupakan salah satu indikator dalam aspek *process* karena dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program serta pencapaian tujuan pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan pelatihan di BPVP Aceh berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang berasal dari peserta, seperti mengundurkan diri karena alasan keluarga, telah diterima bekerja sebelum pelatihan selesai, maupun kurangnya komitmen untuk menyelesaikan pelatihan. Informan menjelaskan sebagai berikut:

"Kendala selama pelatihan lebih banyak berasal dari peserta. Ada peserta yang mengundurkan diri karena alasan keluarga, ada juga yang berhenti karena sudah diterima bekerja. Selain itu, masih terdapat peserta yang kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan pelatihan."³⁸

Dapat diketahui bahwa kendala dalam pelaksanaan pelatihan lebih banyak berasal dari faktor peserta daripada penyelenggara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh peserta mampu menyelesaikan pelatihan hingga akhir karena

³⁸ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

adanya faktor pribadi maupun kesempatan kerja yang diperoleh sebelum pelatihan selesai. Selain itu, masih terdapat peserta yang belum memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kendala yang dialami peserta selama mengikuti pelatihan. Informan menjelaskan sebagai berikut:

“Selama mengikuti pelatihan saya tidak mengalami kendala yang berarti. Seluruh kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dengan jadwal yang telah ditentukan. Selama mengikuti pelatihan saya merasa proses pembelajaran berlangsung dengan baik tanpa hambatan yang memengaruhi kegiatan pelatihan.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peserta tidak mengalami kendala yang berarti selama mengikuti pelatihan. Proses pembelajaran berlangsung dengan baik sehingga peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik teori maupun praktik, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala pelaksanaan pelatihan di BPVP Aceh lebih banyak berasal dari faktor peserta, seperti mengundurkan diri karena alasan keluarga, telah memperoleh pekerjaan sebelum pelatihan selesai, serta kurangnya komitmen dalam menyelesaikan pelatihan. Di samping kendala tersebut, BPVP Aceh juga menghadapi keterbatasan anggaran yang berdampak pada jumlah program pelatihan yang dapat diselenggarakan.

³⁹ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

Namun, keterbatasan anggaran tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan setiap program pelatihan yang telah direncanakan. Meskipun demikian, peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai tidak mengalami hambatan yang berarti selama proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa kendala yang muncul tidak memengaruhi pelaksanaan pelatihan secara keseluruhan sehingga proses pelatihan tetap dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

e. Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan magang merupakan salah satu indikator aspek *process* karena menjadi tahapan lanjutan setelah peserta menyelesaikan pelatihan. Melalui kegiatan magang, peserta diberikan kesempatan untuk menerapkan kompetensi yang telah diperoleh selama pelatihan pada lingkungan kerja sesungguhnya. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa seluruh peserta diwajibkan mengikuti program magang selama satu bulan secara mandiri. Pelaksanaan magang menjadi salah satu syarat bagi peserta untuk memperoleh Sertifikat Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta wajib mengikuti magang selama satu bulan secara mandiri. Sertifikat pelatihan diberikan setelah pelatihan selesai, sedangkan Sertifikat Uji Kompetensi dari BNSP diberikan setelah peserta melaksanakan magang. Apabila peserta langsung diterima bekerja, surat keterangan dari tempat kerja dapat digunakan sebagai pengganti bukti magang."⁴⁰

Pelaksanaan magang merupakan bagian dari tahapan yang harus dilalui peserta setelah menyelesaikan pelatihan. Program magang dilaksanakan selama satu bulan sebagai sarana bagi peserta untuk memperoleh pengalaman kerja dan menerapkan

⁴⁰ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

kompetensi yang telah diperoleh selama pelatihan. Selain itu, pelaksanaan magang juga menjadi salah satu persyaratan dalam proses penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi dari BNSP. Bagi peserta yang telah diterima bekerja setelah pelatihan, surat keterangan dari tempat kerja dapat digunakan sebagai pengganti bukti pelaksanaan magang.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman peserta mengenai pelaksanaan magang setelah mengikuti pelatihan. Informan menjelaskan sebagai berikut”

“Selama pelatihan tidak ada kegiatan magang, tetapi setelah selesai peserta diwajibkan mengikuti program magang atau langsung bekerja. Selama proses tersebut, para peserta tetap berada dalam pengawasan BPVP Aceh sehingga perkembangan kami setelah pelatihan tetap dipantau.”⁴¹

Dapat diketahui bahwa peserta memahami pelaksanaan magang tahap lanjutan setelah pelatihan selesai. Peserta juga menjelaskan bahwa selama menjalani magang maupun setelah bekerja, BPVP Aceh tetap melakukan pengawasan terhadap perkembangan peserta. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan magang tidak hanya bertujuan memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi bagian dari pemantauan terhadap hasil pelatihan yang telah diikuti peserta.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPVP Aceh mewajibkan peserta mengikuti program magang selama satu bulan setelah menyelesaikan pelatihan atau memberikan alternatif berupa surat keterangan kerja bagi peserta yang telah diterima bekerja. Selain itu, BPVP Aceh tetap melakukan pengawasan terhadap peserta selama menjalani magang maupun setelah memasuki dunia kerja. Hal tersebut menunjukkan

⁴¹ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

bahwa pelaksanaan magang menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan sekaligus sebagai upaya memastikan kompetensi peserta dapat diterapkan dalam dunia kerja.

Ditinjau dari model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam, aspek *process* dalam pelatihan vokasi di BPVP Aceh menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini terlihat dari kesesuaian jadwal pelatihan, penerapan metode pembelajaran teori dan praktik, keaktifan peserta, serta pelaksanaan magang sebagai tahap lanjutan untuk menerapkan kompetensi di dunia kerja. Aspek *process* menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan di BPVP Aceh telah berjalan sesuai dengan rencana, dengan komposisi pembelajaran yang lebih menekankan praktik dibandingkan teori serta ditutup dengan program magang wajib.

Temuan ini menunjukkan bahwa BPVP Aceh telah berupaya mengendalikan pelaksanaan program, bukan sekedar memastikan pelatihan berjalan sesuai jadwal. Namun demikian, kendala pelaksanaan yang ditemukan lebih banyak berasal dari faktor peserta (pengunduran diri, keterbatasan komitmen) dan keterbatasan anggaran penyelenggara, sementara penelitian ini belum menemukan data mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala selama pelatihan berlangsung sehingga hal tersebut menjadi keterbatasan data dalam penelitian ini.

4.6 Evaluasi *Product* (Hasil)

Evaluasi *product* merupakan komponen terakhir dalam model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Evaluasi *product* bertujuan untuk menilai hasil atau capaian suatu program, baik hasil yang diharapkan maupun dampak yang ditimbulkan setelah program dilaksanakan. Melalui evaluasi *product*, dapat diketahui sejauh mana tujuan program telah tercapai serta manfaat yang diperoleh oleh sasaran program. Dalam penelitian ini, evaluasi *product* dilakukan untuk mengetahui hasil

pelaksanaan pelatihan vokasi di BPVP Aceh, meliputi keterampilan yang diperoleh peserta, kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, tingkat penyerapan lulusan ke dunia kerja maupun kewirausahaan, penilaian dunia usaha dan dunia industri terhadap lulusan, serta kontribusi pelatihan dalam mengurangi *skill mismatch*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan BPVP Aceh, diperoleh informasi sebagai berikut.

a. Keterampilan yang Diperoleh Peserta Setelah Mengikuti Pelatihan

Keterampilan yang diperoleh peserta setelah mengikuti pelatihan merupakan hasil yang dicapai setelah program pelatihan dilaksanakan. Peningkatan keterampilan menjadi tujuan utama pelatihan vokasi karena diharapkan mampu membekali peserta dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Evaluasi *product* bertujuan untuk menilai hasil atau capaian suatu program, baik hasil yang diharapkan maupun dampak yang ditimbulkan setelah program dilaksanakan. Melalui evaluasi *product*, dapat diketahui sejauh mana tujuan program telah tercapai serta manfaat yang diperoleh oleh sasaran program.

"Peserta pelatihan memperoleh dua jenis keterampilan, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill berkaitan dengan kemampuan teknis sesuai bidang pelatihan, sedangkan soft skill merupakan kemampuan yang mendukung peserta dalam bekerja maupun berwirausaha. Selain itu, kami juga memberikan pembekalan mengenai kewirausahaan agar peserta memiliki peluang untuk membuka usaha secara mandiri setelah menyelesaikan pelatihan."⁴²

Keterampilan yang diperoleh peserta tidak hanya berfokus pada penguasaan kompetensi teknis sesuai bidang pelatihan, tetapi juga mencakup pengembangan *soft skill* dan pengetahuan kewirausahaan. Pembekalan tersebut bertujuan agar peserta

⁴² Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, mewakili Koordinator Pengukuran, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

memiliki kesiapan yang lebih baik dalam memasuki dunia kerja maupun menciptakan peluang usaha secara mandiri setelah menyelesaikan pelatihan.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan yang diperoleh peserta setelah mengikuti pelatihan. Informan menjelaskan sebagai berikut;

“Keterampilan yang saya peroleh setelah mengikuti pelatihan yaitu mampu mengoperasikan mesin espresso, membuat latte art, serta memahami berbagai jenis kopi beserta karakteristiknya. Selain itu, saya juga mempelajari proses pengolahan biji kopi hingga teknik penyajiannya sehingga kemampuan saya dalam bidang barista meningkat dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan.”⁴³

Dapat diketahui bahwa peserta memperoleh keterampilan yang sesuai dengan bidang pelatihan yang diikuti. Keterampilan tersebut tidak hanya berupa kemampuan teknis dalam mengoperasikan peralatan dan menyajikan produk, tetapi juga didukung oleh pemahaman mengenai karakteristik bahan, proses pengolahan, serta prosedur kerja pada bidang barista. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan mampu meningkatkan kompetensi peserta secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta pelatihan di BPVP Aceh memperoleh *hard skill* sesuai dengan bidang keahlian, *soft skill* sebagai pendukung dalam dunia kerja, serta pembekalan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian peserta. Temuan tersebut diperkuat oleh pengalaman peserta yang merasakan peningkatan keterampilan teknis dan pengetahuan pada bidang barista setelah mengikuti

⁴³ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

pelatihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan vokasi di BPVP Aceh telah menghasilkan peningkatan kompetensi peserta sesuai dengan tujuan program.

b. Kesesuaian Keterampilan Peserta dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Kesesuaian keterampilan peserta dengan kebutuhan dunia kerja merupakan salah satu indikator dalam aspek *product* yang menunjukkan sejauh mana hasil pelatihan mampu menghasilkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Kesesuaian tersebut menjadi penting karena tujuan utama pelatihan vokasi adalah mempersiapkan peserta agar memiliki keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung di lingkungan kerja.

Informan menjelaskan bahwa keterampilan yang diberikan kepada peserta telah disusun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hal tersebut didukung oleh metode pembelajaran yang lebih banyak menekankan praktik dibandingkan teori, serta adanya uji kompetensi yang dilaksanakan secara individu sebelum peserta dinyatakan lulus pelatihan.

"Kalau menurut saya keterampilan yang diajarkan sudah sangat baik untuk kebutuhan pelatihan. Peserta tidak hanya diberikan pengetahuan, tetapi lebih banyak melakukan praktik. Praktik dilakukan secara individu sehingga setiap peserta benar-benar menguasai kompetensi yang diajarkan. Di akhir pelatihan peserta juga mengikuti uji kompetensi secara perorangan. Apabila telah lulus pelatihan dan uji kompetensi, maka keterampilan yang dimiliki peserta dinilai telah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan."⁴⁴

Dapat diketahui bahwa BPVP Aceh berupaya memastikan keterampilan yang dimiliki peserta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui pembelajaran yang berorientasi pada praktik dan pelaksanaan uji kompetensi secara individu. Mekanisme tersebut menjadi salah satu bentuk penjaminan bahwa setiap peserta telah menguasai

⁴⁴ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, mewakili Koordinator Pengukuran, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang diikuti sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan yang dijalani. Informan menjelaskan sebagai berikut:

“Menurut saya keterampilan yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Materi yang diberikan sama dengan yang saya kerjakan sekarang sebagai barista, mulai dari mengenal jenis kopi, mengoperasikan mesin espresso, hingga teknik penyajian minuman. Jadi ketika mulai bekerja, saya sudah memiliki bekal keterampilan yang dibutuhkan.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peserta menilai keterampilan yang diperoleh selama pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dijalani. Kompetensi yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan secara langsung di tempat kerja sehingga membantu peserta beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai barista.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPVP Aceh telah membekali peserta dengan keterampilan yang berorientasi pada praktik serta didukung oleh pelaksanaan uji kompetensi secara individu sebagai bentuk penjaminan kompetensi. Hasil tersebut sejalan dengan pengalaman peserta yang menyatakan bahwa keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan secara langsung dalam pekerjaannya sebagai barista. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan vokasi di BPVP Aceh telah menghasilkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

⁴⁵ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

c. Penyerapan Lulusan ke Dunia Kerja dan Kewirausahaan

Penyerapan lulusan ke dunia kerja dan kewirausahaan merupakan salah satu indikator dalam aspek *product* karena menunjukkan sejauh mana hasil pelatihan mampu menghasilkan lulusan yang dapat memasuki dunia kerja maupun menciptakan usaha secara mandiri. Tingkat penyerapan lulusan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelatihan vokasi dalam mencapai tujuan program, yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Meskipun peserta telah memperoleh kompetensi yang memadai, informan menjelaskan bahwa tingkat penyerapan lulusan ke dunia kerja maupun kewirausahaan masih belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah industri di Aceh serta masih rendahnya minat sebagian peserta untuk berwirausaha.

"Penempatan lulusan menjadi tantangan terbesar. Dari seluruh alumni pelatihan, yang berhasil bekerja atau berwirausaha paling banyak sekitar dua puluh persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah industri di Aceh serta masih kurangnya minat peserta untuk berwirausaha. Dari lulusan yang berhasil terserap, sebagian besar memilih berwirausaha dibandingkan bekerja di perusahaan."⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyerapan lulusan pelatihan di BPVP Aceh masih menghadapi berbagai tantangan. Terbatasnya jumlah industri di Aceh menyebabkan kesempatan kerja bagi lulusan menjadi lebih sedikit. Selain itu, minat peserta untuk berwirausaha juga masih perlu ditingkatkan sehingga memengaruhi tingkat penyerapan lulusan setelah menyelesaikan pelatihan. Meskipun demikian, sebagian lulusan telah mampu memanfaatkan keterampilan yang

⁴⁶ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, mewakili Koordinator Pengukuran, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

diperoleh selama pelatihan untuk membuka usaha secara mandiri maupun bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lulusan setelah menyelesaikan pelatihan. Informan menjelaskan sebagai berikut:

“Alhamdulillah, setelah menyelesaikan pelatihan saya langsung bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Keterampilan yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan sangat membantu ketika mulai bekerja karena materi yang dipelajari sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Saya juga merasa lebih percaya diri karena sudah memiliki pengalaman praktik selama mengikuti pelatihan di BPVP Aceh.”⁴⁷

Dapat diketahui bahwa pelatihan yang diikuti telah membantu peserta memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang pelatihan. Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan secara langsung di tempat kerja sehingga memudahkan peserta dalam beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan sebagai barista. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan memberikan manfaat nyata bagi peserta yang berhasil memasuki dunia kerja.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyerapan lulusan di BPVP Aceh masih menghadapi kendala akibat terbatasnya jumlah industri dan rendahnya minat berwirausaha, pelatihan telah mampu menghasilkan lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensi yang diperoleh selama pelatihan. Temuan tersebut diperkuat oleh pengalaman peserta yang berhasil bekerja sebagai barista setelah menyelesaikan pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan vokasi di BPVP Aceh telah memberikan kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi

⁴⁷ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, meskipun tingkat penyerapan lulusan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.

d. Penilaian Dunia Usaha dan Dunia Kerja terhadap Lulusan

Penilaian dunia usaha dan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan merupakan salah satu indikator dalam aspek *product* karena menunjukkan sejauh mana hasil pelatihan telah memenuhi kebutuhan pengguna lulusan. Penilaian dari dunia usaha dan dunia kerja menjadi penting sebagai umpan balik terhadap kualitas kompetensi yang dimiliki lulusan setelah mengikuti pelatihan vokasi. Informan menjelaskan bahwa dunia usaha dan dunia kerja pada umumnya memberikan penilaian yang baik terhadap kemampuan teknis lulusan BPVP Aceh. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan terkait aspek sikap kerja (*work attitude*), seperti kedisiplinan, komitmen, dan kesiapan dalam bekerja.

“Secara keterampilan dan pengetahuan, lulusan BPVP Aceh sudah cukup baik. Namun, yang masih menjadi perhatian adalah sikap kerja. Ada peserta yang telah bekerja, tetapi dalam waktu singkat memutuskan berhenti sehingga menunjukkan bahwa kesiapan bekerja dan sikap profesional masih perlu ditingkatkan.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi teknis lulusan BPVP Aceh telah memperoleh penilaian yang baik dari dunia usaha dan dunia kerja. Akan tetapi, masih terdapat aspek nonteknis yang perlu menjadi perhatian, yaitu sikap kerja (*work attitude*) dan kesiapan peserta dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelatihan tidak hanya

⁴⁸ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, mewakili Koordinator Pengukuran BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

ditentukan oleh penguasaan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga oleh kemampuan lulusan dalam menunjukkan sikap profesional ketika memasuki dunia kerja.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman peserta setelah bekerja. Informan menjelaskan sebagai berikut:

“Menurut saya keterampilan yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan sudah sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Materi yang diberikan selama pelatihan sangat membantu ketika mulai bekerja sehingga saya dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan sebagai barista.”⁴⁹

Dapat diketahui bahwa kompetensi yang diperoleh selama pelatihan telah mendukung peserta dalam melaksanakan pekerjaannya. Kesesuaian antara materi pelatihan dengan pekerjaan yang dijalani menunjukkan bahwa kompetensi lulusan telah memenuhi kebutuhan pekerjaan pada bidang yang ditekuni.

Aspek *product* menunjukkan bahwa pelatihan vokasi di BPVP Aceh telah menghasilkan capaian yang sesuai dengan tujuan program, terutama dalam peningkatan keterampilan dan kompetensi peserta. Peserta memperoleh *hard skill*, *soft skill*, serta pembekalan kewirausahaan yang dapat diterapkan dalam dunia kerja. Keterampilan yang diperoleh juga dinilai sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat diterapkan secara langsung oleh lulusan. Meskipun demikian, penyerapan lulusan masih belum optimal karena terbatasnya industri dan rendahnya minat berwirausaha, serta masih terdapat aspek sikap kerja yang perlu ditingkatkan.

⁴⁹ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

4.7 Kontribusi pelatihan dalam mengatasi *Skill Mismatch*

Kontribusi pelatihan vokasi dalam mengatasi *skill mismatch* merupakan hasil akhir yang menunjukkan sejauh mana pelaksanaan program mampu mengatasi ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki peserta dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Dalam penelitian ini, *skill mismatch* dipahami sebagai kondisi ketika keterampilan yang dimiliki tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Oleh karena itu, pelatihan vokasi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesesuaian kompetensi peserta sehingga peluang memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian menjadi lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa pelatihan vokasi yang diselenggarakan BPVP Aceh telah memberikan kontribusi dalam mengatasi *skill mismatch*. Hal tersebut didukung oleh penyusunan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja, penggunaan peralatan praktik yang relevan dengan dunia kerja, serta pelaksanaan magang setelah pelatihan sebagai sarana untuk memperkuat kompetensi. Informan menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau saya rasa yang diajarkan di balai memang sudah sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Peralatan yang digunakan juga sudah sama dengan yang ada di dunia usaha dan dunia kerja, hanya beberapa kejuruan saja yang memang belum di upgrade. Menurut saya pelatihan ini sudah mampu mengatasi *skill mismatch* karena setelah pelatihan peserta juga melaksanakan magang selama satu bulan. Kekurangan selama pelatihan dapat dilengkapi ketika peserta mengikuti magang di dunia usaha dan dunia kerja. Jadi apabila mengikuti off the job training dan on the job training, saya rasa *skill mismatch* tidak akan terjadi.”⁵⁰

⁵⁰ Koordinator Penyelenggaraan BPVP Aceh, mewakili Koordinator Pengukuran, wawancara oleh penulis, 13 Juli 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BPVP Aceh telah berupaya mengatasi *skill mismatch* melalui pelatihan berbasis kompetensi yang dipadukan dengan pengalaman praktik di dunia kerja. Kombinasi antara pembelajaran di balai (*off the job training*) dan magang di dunia usaha maupun dunia kerja (*on the job training*) memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pekerjaan secara nyata.

Selain memperoleh informasi dari pihak BPVP Aceh, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 2 selaku lulusan BPVP Aceh yang telah bekerja sebagai barista di SMEA Premium SP 5. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi pelatihan vokasi dalam mengatasi *skill mismatch* berdasarkan pengalaman peserta setelah memasuki dunia kerja. Informan menjelaskan sebagai berikut:

“Menurut saya pelatihan yang diberikan membantu mengurangi skill mismatch. Selama mengikuti pelatihan saya memperoleh keterampilan yang memang dibutuhkan di tempat kerja. Setelah lulus saya juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang pelatihan sehingga keterampilan yang saya pelajari dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan.”⁵¹

Dapat diketahui bahwa pelatihan yang diikuti telah membantu peserta memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kesesuaian antara materi pelatihan, praktik, serta pengalaman bekerja menunjukkan bahwa pelatihan vokasi memberikan kontribusi dalam mengatasi *skill mismatch* antara kompetensi peserta dengan tuntutan dunia kerja.

Ditinjau dari model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam, peserta memperoleh keterampilan sesuai dengan bidang pelatihan yang diikuti, kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja, serta sebagian

⁵¹ Peserta lulusan BPVP Aceh, wawancara oleh penulis, 26 Juli 2026.

lulusan telah berhasil bekerja maupun berwirausaha. Penilaian dari dunia usaha dan dunia kerja juga menunjukkan bahwa kompetensi teknis lulusan BPVP Aceh telah dinilai baik, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek sikap kerja (*work attitude*) dan kesiapan bekerja. Dengan demikian, pelatihan vokasi di BPVP Aceh telah memberikan kontribusi dalam mengatasi *skill mismatch* melalui peningkatan kompetensi peserta agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun demikian, kontribusi tersebut masih perlu terus ditingkatkan, terutama melalui penguatan sikap kerja peserta, pembaruan sarana pelatihan pada beberapa kejuruan, serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia kerja agar penyerapan lulusan menjadi lebih optimal.

4.8 Faktor-faktor yang Menyebabkan Program Pelatihan Vokasi Belum Optimal dalam Mengatasi Skill Mismatch

Program pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh BPVP Aceh telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kompetensi peserta serta membantu mengatasi *skill mismatch*. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan program pelatihan belum optimal dalam mengatasi *skill mismatch* secara menyeluruh. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek internal maupun eksternal yang memengaruhi keberhasilan lulusan dalam memasuki dunia usaha dan dunia kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pertama yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan program adalah terbatasnya jumlah dunia usaha dan dunia kerja di Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPVP Aceh diketahui bahwa penyerapan lulusan masih menjadi tantangan karena kesempatan kerja di Aceh relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh lulusan dapat memperoleh

pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki meskipun telah menyelesaikan pelatihan.

Selain itu, rendahnya minat peserta untuk berwirausaha juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya hasil pelatihan. Pihak BPVP Aceh menjelaskan bahwa sebagian besar peserta masih lebih memilih bekerja sebagai karyawan dibandingkan membangun usaha secara mandiri. Akibatnya, ketika kesempatan kerja di perusahaan terbatas, masih banyak lulusan yang belum mampu memanfaatkan kompetensi yang dimiliki melalui kegiatan kewirausahaan.

Faktor berikutnya adalah sikap kerja (*work attitude*) dan kesiapan bekerja peserta. Berdasarkan hasil wawancara, dunia usaha dan dunia kerja memberikan penilaian yang baik terhadap kompetensi teknis lulusan BPVP Aceh. Akan tetapi, masih terdapat beberapa lulusan yang mengundurkan diri setelah bekerja dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguasaan keterampilan dan pengetahuan saja belum cukup apabila tidak diimbangi dengan sikap kerja yang baik, seperti kedisiplinan, komitmen, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Selain faktor tersebut, komitmen sebagian peserta selama mengikuti pelatihan juga menjadi kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPVP Aceh diketahui bahwa terdapat peserta yang mengundurkan diri karena alasan keluarga, telah diterima bekerja sebelum pelatihan selesai, maupun kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua peserta memperoleh kompetensi secara utuh sesuai dengan kurikulum pelatihan yang telah dirancang.

Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa sarana pelatihan yang perlu diperbarui agar semakin sesuai dengan perkembangan

teknologi dan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Meskipun secara umum fasilitas praktik telah memadai, pihak BPVP Aceh menjelaskan bahwa pada beberapa kejuruan masih diperlukan pembaruan peralatan agar kompetensi peserta semakin relevan dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa belum optimalnya program pelatihan vokasi dalam mengatasi *skill mismatch* tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan pelatihan itu sendiri, tetapi juga oleh faktor eksternal, seperti keterbatasan kesempatan kerja di Aceh, serta faktor internal yang berasal dari peserta, seperti sikap kerja, komitmen, dan minat berwirausaha. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelatihan vokasi di BPVP Aceh telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kompetensi peserta agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, optimalisasi program pelatihan ke depan perlu dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia kerja, peningkatan pembinaan sikap kerja (*work attitude*), pengembangan jiwa kewirausahaan peserta, serta pembaruan sarana pelatihan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya program pelatihan vokasi dalam mengatasi *skill mismatch* dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal sehingga diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Evaluasi program pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh berdasarkan model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada aspek *context*, BPVP Aceh telah menyusun program pelatihan berdasarkan hasil *Training Need Analysis* (TNA) dan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, serta menyesuaikan jenis pelatihan dengan karakteristik pasar kerja Aceh yang sektor industrinya masih terbatas sehingga sebagian program diarahkan pada penguatan kewirausahaan. Pada aspek *input*, BPVP Aceh telah menyediakan instruktur bersertifikat kompetensi, materi pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta mekanisme seleksi peserta yang sistematis; sarana dan prasarana secara umum telah memadai, meskipun sebagian peralatan pada beberapa kejuruan masih memerlukan pembaruan. Pada aspek *process*, pelaksanaan pelatihan telah berjalan sesuai jadwal dengan komposisi pembelajaran sekitar 30% teori dan 70% praktik serta dilanjutkan dengan program magang selama satu bulan, meskipun mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran selama pelatihan belum terdokumentasi secara rinci dalam penelitian ini. Pada aspek *product*, peserta memperoleh *hard skill* dan *soft skill* yang sesuai dengan bidang pelatihan dan dinilai baik oleh dunia usaha dan dunia kerja dari sisi kompetensi teknis, tetapi tingkat penyerapan lulusan ke dunia kerja maupun kewirausahaan masih belum optimal dan aspek sikap kerja (*work attitude*) lulusan masih menjadi catatan. Secara keseluruhan, keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa pelatihan vokasi di BPVP Aceh telah

berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi peserta dan mengurangi potensi *skill mismatch*, tetapi kontribusi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan *skill mismatch* karena masih dipengaruhi oleh faktor internal peserta dan faktor eksternal pasar kerja di Aceh sebagaimana diuraikan pada faktor penyebab berikut.

2. Faktor-faktor penyebab program pelatihan vokasi belum optimal dalam mengurangi *skill mismatch* adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan program pelatihan vokasi di BPVP Aceh belum optimal dalam mengatasi *skill mismatch*. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Sikap kerja (*work attitude*) dan kesiapan bekerja peserta yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun lulusan BPVP Aceh telah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dinilai cukup baik, masih terdapat kekurangan pada aspek sikap kerja dan kesiapan dalam memasuki dunia kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguasaan kompetensi teknis belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan untuk mempertahankan pekerjaan, beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta memiliki komitmen dan sikap profesional dalam bekerja.
2. Kurangnya komitmen sebagian peserta dalam menyelesaikan pelatihan. Dalam pelaksanaan pelatihan masih ditemukan peserta yang mengundurkan diri karena alasan keluarga, berhenti karena telah memperoleh pekerjaan, maupun kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan proses pelatihan serta hasil kompetensi yang diperoleh peserta. Peserta yang tidak

menyelesaikan pelatihan juga tidak memperoleh keseluruhan pengalaman pembelajaran dan praktik yang telah dirancang dalam program.

3. Terbatasnya dunia usaha dan dunia kerja yang dapat menyerap lulusan di Aceh. Keterbatasan jumlah dunia usaha dan dunia kerja di Aceh menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan lulusan setelah menyelesaikan pelatihan. Meskipun peserta telah memperoleh kompetensi melalui pelatihan, terbatasnya kesempatan kerja menyebabkan tidak seluruh lulusan dapat bekerja sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki. Kondisi tersebut pada akhirnya memengaruhi optimalisasi hasil pelatihan dalam mengatasi *skill mismatch*.
4. Masih rendahnya minat sebagian peserta untuk berwirausaha. Selain keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya minat sebagian peserta untuk memilih jalur kewirausahaan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyerapan lulusan belum optimal. Padahal, keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk membuka usaha secara mandiri. Rendahnya minat tersebut menyebabkan alternatif pemanfaatan kompetensi melalui kewirausahaan belum sepenuhnya dapat meningkatkan penyerapan lulusan.
5. Sarana dan peralatan pada beberapa kejuruan masih perlu diperbarui. Meskipun sarana dan prasarana secara umum telah mendukung pelaksanaan pelatihan, masih terdapat beberapa kejuruan yang menggunakan peralatan yang belum diperbarui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Kondisi tersebut dapat menjadi kendala dalam memastikan peserta memperoleh pengalaman menggunakan peralatan yang sesuai dengan kondisi kerja sebenarnya. Oleh karena itu, pembaruan sarana dan

peralatan diperlukan agar kompetensi peserta semakin relevan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pekerjaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi BPVP Aceh: BPVP Aceh diharapkan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan vokasi melalui pembaruan sarana dan prasarana pada beberapa kejuruan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Selain itu, BPVP Aceh perlu memperkuat pembinaan sikap kerja (*work attitude*) peserta melalui pembiasaan disiplin, tanggung jawab, etika kerja, komunikasi, dan komitmen selama proses pelatihan. BPVP Aceh juga diharapkan dapat memperluas kerja sama dengan dunia usaha dan dunia kerja dalam penyusunan materi pelatihan, pelaksanaan magang, serta penempatan lulusan agar kompetensi yang dimiliki peserta semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. Di samping itu, monitoring terhadap alumni perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan lulusan setelah menyelesaikan pelatihan serta menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan program pelatihan pada periode berikutnya.
2. Bagi Dunia Usaha dan Dunia Kerja: Dunia usaha dan dunia kerja diharapkan dapat memperkuat kemitraan dengan BPVP Aceh melalui penyediaan tempat magang, pemberian masukan terhadap kebutuhan kompetensi tenaga kerja, serta peningkatan kesempatan kerja bagi lulusan pelatihan. Selain itu, dunia usaha dan dunia kerja diharapkan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) secara berkala mengenai kompetensi lulusan yang telah bekerja sehingga BPVP Aceh

dapat terus melakukan penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, dan materi pelatihan sesuai dengan perkembangan kebutuhan tenaga kerja.

3. Bagi Peserta Pelatihan: Peserta pelatihan diharapkan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh, meningkatkan komitmen dalam menyelesaikan pelatihan, serta memanfaatkan kegiatan praktik dan magang sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang keahlian yang dipilih. Selain itu, peserta diharapkan terus mengembangkan sikap kerja (*work attitude*), seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, dan profesionalisme, sehingga tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kesiapan memasuki dunia usaha dan dunia kerja. Peserta juga diharapkan mampu memanfaatkan kompetensi yang dimiliki untuk membuka usaha secara mandiri apabila kesempatan kerja formal masih terbatas.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai evaluasi pelatihan vokasi dengan menggunakan model evaluasi lain atau mengombinasikan model evaluasi CIPP dengan pendekatan yang berbeda sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak informan dari dunia usaha dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan sehingga penilaian terhadap kompetensi lulusan dapat dianalisis secara lebih mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak pelatihan vokasi terhadap penyerapan lulusan dalam jangka panjang sehingga efektivitas program dalam mengatasi *skill mismatch* dapat diketahui secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Antara. “BPVP Banda Aceh Latih 352 Peserta Jadi Wirausaha Muda.” *Aceh Antaranews*, 2025. https://aceh.antaranews.com/berita/335733/bpvp-banda-aceh-latih-352-peserta-jadi-wirausaha-muda?utm_source=.
- “Disnakermobduk: BLK Bisa Ciptakan Generasi Yang Lebih Mandiri.” *Aceh.Antaranews*, 2023. https://aceh.antaranews.com/berita/324789/disnakermobduk-blk-bisa-ciptakan-generasi-yang-lebih-mandiri?utm_source=.
- Amiruddin, SE., M.Si. “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lppd) Tahun 2023.” *Pemko Banda Aceh*, 2024, 1–252.
- Antara aceh. “BPVP Banda Aceh Latih 3.800 Orang Dengan Berbagai Keahlian Selama 2024.” *Aceh.Antaranews*, 2025. https://aceh.antaranews.com/berita/375163/bpvp-banda-aceh-latih-3800-orang-dengan-berbagai-keahlian-selama-2024?utm_source=.
- Arif Wijayanta, Pardjono. “Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Unit Pelaksana Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktifitas (BBPVP) Bandung.” *Jurnal Karya Ilmiah Guru* 10, no. 3 (2025): 1861–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i3.2068>.
- Ayi Najmul Hidayat, Nana Ismelani. “Peran Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Keterampilan Masyarakat.” *Journal of Social Humanities and Education* 1, no. 4 (2022): 181–90.
- Azkia, Nora. “Analisis Peranan Pelatihan Vokasi Oleh BPVP Banda Aceh Dalam Peningkatan Kapasitas Keterampilan Pengangguran Terdidik Lulusan Perguruan Tinggi Di Kota Banda Aceh,” 2023, 1–9.
- Husnullail, M., Risnita, M. Syahrani Jailani, and Asbui. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.
- INewsBekasi.id. “Informan Penelitian Kualitatif Menurut Sugiyono: Panduan Lengkap,” n.d. <https://bacalagers.com/informan-penelitian-kualitatif-menurut-sugiyono/>.
- Kemenaker. “Wujudkan Kemandirian Ekonomi, BPVP Banda Aceh Resmi Buka Pelatihan Kewirausahaan Batch 1.” *Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Banda Aceh*, 2025. https://blkaceh.kemnaker.go.id/wujudkan-kemandirian-ekonomi-bpvp-banda-aceh-resmi-buka-pelatihan-kewirausahaan-batch-1/?utm_source=.
- Maulana, Arif, and Nugrahyu Suryaningrum. “Pendidikan Vokasi, Pelatihan Dan Pengangguran Usia Muda Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Vocational Education, Training, and Youth Unemployment in Indonesia during the Covid-19 Pandemic.” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 18, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.55981/jki.2023.1697>.

- Organización Internacional del Trabajo (OIT). *Skills Mismatch in Europe*. Departamento de Estadísticas, OIT, 2014.
- Ruswandi, Putri Intan Ainiyyah. “Implementasi Model Evaluasi CIPP Dalam Pelaksanaan Program Pelatihan Vokasi Bagi Masyarakat Tahun 2023 Di PPSDM KEBTKE.” *Universitas Pendidikan Indonesia* 4, no. 1 (2024): 9–15.
- Sakarinto, Wikan. “Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Provesi,” no. May (2020).
- “Vokasi Kini Lebih Modern: Mengupas Permenaker No.6 Tahun 2025.” *Kita Kompeten Muda-Kreatif-Inovatif*, 2025. https://kitakompeten.id/vokasi-kini-lebih-modern-mengupas-permenaker-no-6-tahun-2025/?utm_source=.
- Wibowo, Stevanus Agung. “EVALUASI PROGRAM PELATIHAN VOKASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SELAMA PERIODE PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021.” *Universitas Pandjadjaran*, 2022, 1–16.
- World Bank Group. “Indonesia’s Critical Occupations List 2018,” 2020. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/519581585858136687/pdf/Indonesia-as-Critical-Occupations-List-2018-Occupation-Profiles.pdf>.
- Yassierli. “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi” 11, no. 1 (2025): 1–44. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : B-654/Un.08/FISIP.1.05/04/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802068

Nama : NUR'AINI WANDIRA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jenderal Ahmad Yani Ling Trandam Kota Kutacane

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EVALUASI PROGRAM PELATIHAN VOKASI DALAM MENGATASI SKILL MISMATCH DI BALAI LATIHAN KERJA ACEH**

Banda Aceh, 13 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 28 Agustus 2026

Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3060/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 November 2025**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.** Sebagai pembimbing I
2. **Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : **Nur'aini Wandira**
- NIM : **220802068**
- Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
- Judul : **Evaluasi Program Pelatihan Vokasi Dalam Mengurangi Skill Mismatch Pada BLK Aceh**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3 Dokumentasi

